

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Kebudayaan

##### 2.1.1 Pengertian kebudayaan

Kebudayaan adalah seluruh sistem gagasan dan rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan belajar (Koentjaraningrat, 1996:72). Koentjaraningrat (1987:12), menyebutkan bahwa karakteristik atau bentuk kebudayaan merupakan suatu unsur-unsur yang universal. Unsur-unsur kebudayaan tersebut adalah:

1. Sistem religi dan upacara keagamaan, yaitu sistem kepercayaan dengan segala bentuk pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari;
2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan, yaitu adanya tatanan masyarakat yang mempunyai pola hubungan tertentu;
3. Sistem pengetahuan, yaitu hasil daya cipta, karya dan karsa manusia;
4. Bahasa, yaitu alat komunikasi yang digunakan golongan masyarakat;
5. Kesenian, yaitu berbagai bentuk produk seni;
6. Sistem mata pencaharian hidup, yaitu sistem pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; dan
7. Sistem teknologi dan peralatan, yaitu produk ciptaan manusia berdasarkan ilmu.

Pengertian kebudayaan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (Tim pusat pembinaan dan pengembangan bahasa; 1997: 130) adalah pikiran atau akal budi, kebudayaan atau yang mengenai kebudayaan yang sudah berkembang.

Kebudayaan menurut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 adalah (1) Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul dari buah hasil usaha budaya rakyat Indonesia seluruhnya; (2) Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa dan (3) Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta dapat mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut:

- Sistem ide;
- Sistem sosial; dan
- Sistem fisik.

Sistem ide akan mengatur dan memberikan arah pada sistem sosial dan selanjutnya akan menghasilkan sistem fisik. Sebaliknya sistem fisik tersebut akan membentuk suatu lingkungan hidup tertentu yang makin lama makin menjauhkan manusia dari lingkungannya alamiahnya, sehingga bisa mempengaruhi sistem sosial, bahkan juga bisa mempengaruhi sistem idenya. Dengan kata lain bahwa perubahan pada benda budaya (sistem fisik) tentu menyebabkan perubahan pada sistem sosial dan sistem idenya, serta perubahan pada sistem ide juga akan mempengaruhi sistem sosial dan sistem fisiknya.

### 2.1.2 Kebudayaan Bali

Kebudayaan lahir semenjak manusia ada. Budaya merupakan produk manusia yang digunakan untuk mengatur kelangsungan hidup manusia, baik terhadap alam dan hubungan antar manusia, maka pada tahap selanjutnya segala tindakan manusia akan bergantung dan dipengaruhi oleh kebudayaan yang ada dalam masyarakat di manapun manusia berada. Dalam kaitannya dengan budaya, Bali memiliki pola dan struktur tata ruang tradisional Bali seperti konsep psiko-kosmik, *Tri Hita Karana*, *Tri Angga/ Tri Mandala*, *Nawa Sanga*, *Rwa Bhineda* dan dipadukan dengan *Asta Kosala* (ukuran dan konstruksi tempat suci), *Asta Kosali* (ukuran bangunan), *Asta Bumi* (tata ruang bangunan dan pekarangan) serta *Hala Hayuning Palembang*. Konsep psiko-kosmik juga menjadi salah satu konsep hindu yang mempunyai pengaruh kuat dalam membentuk karakter ruang tradisional dan arsitektur Bali. Konsep psiko-kosmik adalah konsepsi Hindu-Bali yang dapat dijelaskan melalui simbolisme dunia spiritual dalam lingkup dunia fisik (*sekala*) dan hubungannya dengan dunia metafisik (*niskala*). Hindu secara luas menurut Wiana (2008) bukan agama yang hanya mengajarkan tentang kerohanian untuk mencapai *sorga* atau *moksha*. Di Bali, penerapan Hindu juga mengajarkan tentang kehidupan yang seimbang dan terpadu antara kehidupan jasmaniah (*Duniawi/ Sekala*) dan rohaniah (*Spiritual/ Niskala*). Hal ini dapat kita lihat dari penerapan sistem religi Hindu yang memotivasi umat di Bali agar membangun kehidupannya secara *sekala* dan *niskala* (Wiana, 2008).

Agama, adat dan kepercayaan, melatarbelakangi ilmu-ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan melandasi agama bila agama dianut untuk stabilitas kepercayaan yang ilmiah (Gelebet, *et al.*,1985:22-23). Sehingga menjadi jelas bahwa agama dan ilmu

pengetahuan merupakan pertimbangan dalam sistem religi dan pengetahuan yang harmonis. Sistem religi berpedoman pada *panca srada* sebagai pokok-pokok kepercayaan dan *panca yadnya* sebagai pokok-pokok pelaksanaan upacara keagamaan.

### 2.1.3 Tinjauan perubahan kebudayaan

Mantra (1990:10), menyatakan bahwa apa yang dihasilkan manusia itu terbentuk karena latar belakang sosial budaya manusianya atau kondisi sosial manusianya. Rupanya hal tersebut lebih dilihat pada prosesnya, yang diawali dari masyarakat berperadaban “*primitif*”, kemudian berkembang menjadi masyarakat berperadaban “*vernakular*”. Selanjutnya peradaban “*vernakular*” dibedakan menjadi “*vernakular pra industri*”, dan “*vernakular modern*”.

Perubahan kebudayaan dapat disebabkan dari dua proses, yaitu sebagai berikut:

1. Proses dari dalam (endogen):

Hal ini dimulai dari kegiatan-kegiatan kebudayaan masyarakat, lambat laun kegiatan-kegiatan itu akan mengalami berbagai variasi yang pada hakekatnya merupakan perubahan. Perubahan itu dapat juga membawa pengaruh terhadap perubahan dalam sektor lain dan bila menunjukkan gejala diferensiasi yang semakin kompleks maka disebut perkembangan.

2. Proses dari luar (eksogen):

Meliputi industrialisasi, kontak dengan budaya lain (kepariwisataan) dan lain-lain yang tidak saja menimbulkan dampak positif, tapi juga dampak negatif yang dialami masyarakat yang mengalami kontak dengan budaya luar. Yang harus diperhatikan dalam rangka perubahan sosial yang diakibatkan oleh kontak dengan masyarakat luar adalah dua akibat penting, yaitu difusi (satu sektor berubah) dan akulturasi (semua sektor berubah).

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi perubahan sosial kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Sebab-sebab yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri (*endogen*) yang meliputi:

- a. Bertambah/ berkurangnya penduduk; bertambahnya penduduk menyebabkan terjadinya perubahan struktur masyarakat yang diikuti dengan perubahan pola kebudayaan masyarakat (sikap, perilaku dan pola fisik) seperti perubahan dalam sistem hak milik atas tanah. Berkurangnya penduduk dapat disebabkan oleh wabah, bencana alam, berpindahnya penduduk (emigrasi,

imigrasi, urbanisasi maupun transmigrasi). Perpindahan penduduk tersebut dapat menyebabkan kekosongan misalnya nampak pada gejala stratifikasi sosial atau pembagian kerja dan sebagainya yang akan mempengaruhi lembaga-lembaga lainnya.

- b. Penemuan-penemuan baru; hal-hal baru yang ditemukan itu dapat berupa unsur-unsur kebudayaan seperti nilai, norma, cita-cita yang menggerakkan pola bersikap, perilaku atau pola sarana fisik atau dapat juga berupa unsur struktur masyarakat (hubungan, status dan organisasi baru). Penemuan baru itu terjadi karena didorong oleh kesadaran dari orang perorang akan kekurangan struktur kebudayaan, kualitas ahli serta perangsang bagi kegiatan penciptaan dalam masyarakat. Penemuan-penemuan itu misalnya radio, pesawat, telepon, mobil dan sebagainya.
  - c. Pertentangan (konflik); pertentangan ini bisa terjadi antara orang perorang dengan kelompoknya, antar kelompok, generasi tua dengan generasi muda. Pertentangan antara kepentingan individu dengan kelompoknya terjadi pada masyarakat tradisional yang punya ciri kehidupan kolektif, segala kegiatan didasarkan pada kepentingan individu dan kelompoknya yang menyebabkan dirinya mempunyai fungsi sosial. Pertentangan-pertentangan di atas akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan.
  - d. Terjadinya pemberontakan (revolusi); suatu revolusi merupakan perubahan yang cepat dan mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat, sehingga terjadi perubahan-perubahan besar baik struktural maupun pola kebudayaan masyarakat, misalnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.
2. Sebab-sebab yang bersumber dari luar masyarakat (eksogen) yang meliputi; lingkungan alam fisik (terjadinya gempa bumi, kebakaran, banjir besar dan lain-lain yang dapat merubah kehidupan masyarakat); atau oleh sebab manusia lainnya di luar kelompok masyarakat (peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain).

Dalam masyarakat terjadi suatu proses perubahan terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghalangi terjadinya proses perubahan. Faktor-faktor yang mendorong antara lain: kontak dengan kebudayaan lain, sistem pendidikan formal yang maju, penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi kemasa depan, disorganisasi dalam masyarakat serta sikap

mudah dalam menerima hal-hal baru. Faktor-faktor yang menghalangi antara lain: kurangnya hubungan dengan masyarakat lain, sikap masyarakat yang sangat tradisional, adanya kepentingan yang tertanam kuat sekali, sikap tertutup, hambatan yang bersifat ideologis, adat atau budaya serta nilai yang menganggap bahwa hidup ini pada hakekatnya buruk dan tidak mungkin diperbaiki.

## **2.2 Tinjauan Tata Ruang Fisik Kawasan Istana**

### **2.2.1 Tinjauan tentang kawasan bersejarah**

Pengertian kawasan bersejarah didasarkan pada definisi Undang-Undang Republik Indonesia No. 26 tahun 2007 pasal 1 tentang Penataan Ruang adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Selain itu, kawasan dapat pula merupakan kawasan tertentu, dengan definisi kawasan adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan kawasan bersejarah adalah kelompok bangunan, tapak, istana dan artefak lainnya yang berada pada suatu lingkungan baik desa maupun kota dan dilindungi oleh negara.

Kota selalu berkembang dari waktu ke waktu, perkembangan yang dalam hal ini menyangkut aspek-aspek politik, sosial, budaya, teknologi, ekonomi dan fisik (Yunus, 2002:107). Akan menyisakan berbagai elemen kota sebagai saksi dari perkembangan yang terjadi. Elemen-elemen inilah yang secara fisik membentuk karakter suatu kota. Elemen-elemen yang dimaksud dapat berupa bangunan bersejarah, monumen atau benda-benda bersejarah lainnya.

Kota sebagai '*urban artifact*' dalam perjalanan sejarahnya telah dan akan terus membentuk suatu pola morfologi sebagai implementasi bentuk perubahan sosial budaya masyarakat yang membentuknya. Karakteristik suatu kawasan kota berkaitan dengan sejarah perkembangan kawasan, artefak yang ada di antaranya berupa bangunan, penggunaan lahan yang membentuk kawasan fungsional dan sirkulasi atau pergerakan di dalam kawasan.

Kawasan bersejarah merupakan kawasan yang memiliki kaitan dengan suatu kehidupan di masa lalu yang lebih dari 50 tahun (Wirjomantono, 2002:268). Kawasan bersejarah bisa berupa permukiman atau fasilitas kegiatan umum lainnya yang digunakan kolektif seperti pelabuhan/ bandar, tambang mineral atau logam, medan dan

tempat perlindungan perang, istana kerajaan, pura pemujaan atau tempat ibadah, kuburan atau istana dan sirkulasi di dalamnya.

### 2.2.2 Pengertian istana atau keraton

Secara etimologi, kata istana diambil dari bahasa sansekerta, yaitu *asthana*, dengan padanan kata yang lain, yaitu kata *mahligai*, yang memiliki arti sama, yaitu kerajaan milik para dewa (dalam kosmologi agama Hindu dan Budha), yang berusaha ditiru oleh kepala negara atau bangsawan, dengan ciri bangunan yang mewah dan atau tinggi menjulang. Menurut Sedyawati (2002), istilah istana pada masa apapun selalu memiliki arti penting sebagai pusat penampilan kecanggihan hidup pada masa itu, yang menggambarkan institusi sang pemimpin, misalnya raja, ratu, sultan, khalifah hingga pada sosok presiden melalui istana kepresidenan pada masa kini, terutama pada waktu terdahulu institusi pemimpin tersebut berfungsi sebagai pengayom dan pelindung seni.

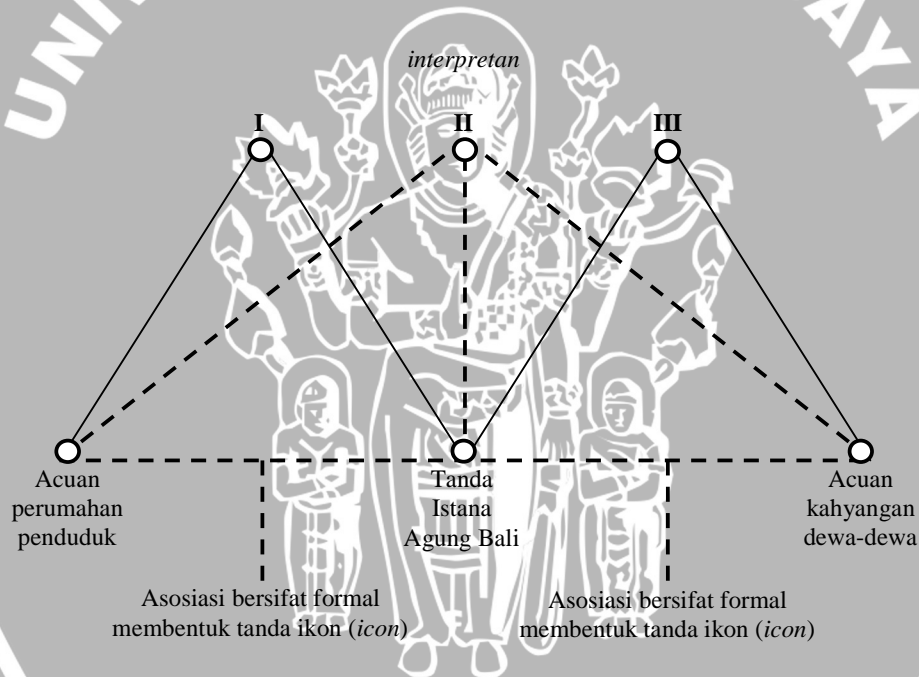
Istilah dalam bahasa Inggris yaitu *palace*, yang diterjemahkan ke dalam kamus bahasa Indonesia sebagai istana, memiliki definisi menurut Kamus Besar Bahasa Inggris keluaran Oxford, yaitu hunian/ tempat dinas dari raja, paus, uskup (abad 13), bangunan mewah (abad 14), atau tempat yang menyediakan hiburan mewah bagi bangsawan (abad 19). Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian dan prasyarat sebuah istana adalah sebuah tempat hunian bagi institusi pesohor di dalam masyarakat, yang luasan wilayah dan masa bangunannya cukup menimbulkan kekaguman melebihi ruang fisik bangunan lain, dan merupakan tempat dimana sang pesohor dapat menjalankan fungsinya di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada masa Hindu dan Budha, konsep pembangunan dan pencitraan Istana mulai berkembang di tanah air mengikuti kultur lokal dari agama besar tersebut, dan pada akhirnya menjadi lebih sering disebut Keraton. Kata Kraton/Keraton yang berasal dari kata 'keratuan', memiliki arti sebagai istana atau tempat kediaman dari seorang ratu (raja), atau ke-datuk-an (datuk; bahasa melayu untuk bangsawan) sehingga akhirnya bisa disebut juga Kedaton (Kertanegara, 2003:1).

Bangunan istana atau keraton pada dasarnya adalah suatu kumpulan ruang yang terjadi akibat susunan karya arsitektur. Ruang dalam arsitektur sangat penting, sebab tujuan utama karya arsitektur adalah bagaimana membentuk ruang agar indah, nyaman dan memenuhi fungsi tertentu. Begitu pula yang terjadi pada istana atau keraton. Suatu kompleks bangunan dapat dinyatakan istana atau keraton karena memiliki kekhususan dalam ruang-ruangnya. Berkenaan dengan ruang dalam karya arsitektur, Cornelis van de Ven menyatakan, "Ruang harus dibuat proposional dan menunjukkan proporsi itu ke

luar. Sasaran arsitektur adalah menciptakan ruang, maka arsitektur juga berawal dari ruang” (De Ven; 1991: 173).

Di Jawa dan Bali, keraton merupakan perwakilan dari jagat raya menurut kosmologi kebudayaan Hindu-Buddha. Menurut pandangan Hindu, alam semesta berpusat pada sebuah benua bernama *Jambudwipa*. Benua ini dilingkari tujuh pulau, yang dipisahkan tujuh samudra. Di lingkaran samudra terluar terdapat pembatas berupa barisan pegunungan besar. Pada tengah *Jambudwipa* tegaklah Gunung *Meru*. Di puncaknya, para dewa bertahta, menghuni istana nan megah, dan di sekeliling istana tersebut terdapat istana lain tempat para *Dewa Lokapala*, sang penjaga jagat. Konsep alam semesta seperti ini hampir mirip dengan pandangan Buddha. Munandar (2005: 293) menyatakan bahwa setidaknya terdapat tiga interpretasi/ sudut pandang manusia terhadap bentuk “istana di Bali” (Gambar 2.1).



**Intrepretan I** : Istana sebagai bangunan tempat tinggal manusia biasa, sebagaimana layaknya rumah tinggal penduduk Bali pada umumnya

**Intrepretan II** : Istana di Bali adalah sebagai tempat persemayaman dewa, karena raja adalah dewa nyata yang menjelma ke alam manusia

**Intrepretan III** : Istana sebagai bentuk persemayaman dewa-dewa dan tempat tinggal manusia, karena istana terletak di antara dunia dewa-dewa dan manusia

Gambar 2.1 Intrepestasi manusia terhadap konsep bangunan keraton istana.

Sumber : Munandar (2005: 293)

### 2.2.3 Konsep tata ruang berdasarkan keagamaan dan kebudayaan orang Hindu Bali

Pengaruh agama sangat melekat pada diri orang-orang Hindu Bali sehingga menghasilkan corak budaya, integrasi sosial dan sistem pengendalian masyarakat yang unik dan spesifik. Dalam kitab Weda disebutkan *mokshartam jagadhitaya caiti dharmah* artinya yang dikejar oleh umat Hindu adalah kebahagiaan duniawi ketika masih hidup. Orang tidak dibenarkan hanya mementingkan kebahagiaan akhirat namun menyepelekan kesejahteraan hidup di dunia ini.

Mulyadi (2004) yang meneliti tentang tata ruang Bali mengatakan bahwa salah satu kepercayaan di dalam agama Hindu secara universal yang terpenting adalah *pancha sradha*. *Pancha* adalah lima, sedangkan *sradha* adalah keyakinan. *Pancha sradha* ini terdiri dari *widi sradha*, adalah suatu kepercayaan akan adanya Tuhan *Ida Sang Hyang Widi* dalam bentuk trimurti yang merupakan manifestasi *Dewa Brahma* (berfungsi sebagai pencipta), *Dewa Wisnu* (berfungsi sebagai pemelihara), dan *Dewa Siwa* (berfungsi sebagai penghancur atau pengembali isi dunia ke asalnya manakala sudah tidak bermanfaat). *Atma sradha* adalah suatu keyakinan adanya jiwa dalam setiap makhluk hidup. *Karmapala sradha* adalah suatu keyakinan akan adanya hukum sebab akibat dari segala perbuatan yang dilakukan selama menjalani masa kehidupan di dunia. *Punarbhawa* atau *samsara srada* adalah suatu keyakinan akan adanya kebahagiaan abadi, yakni kembalinya *atma* kepada *patamaatma* yang berarti kebebasan jiwa dari lingkaran proses kelahiran kembali.

Di dalam filsafat Hindu terdapat ajaran bahwa manusia hendaknya menyelaraskan diri dengan alam. Pandangan ini menghendaki dua jenis kemenangan, yakni kemenangan lahiriah dan kemenangan batiniah. Alam semesta berasal dari lima unsur yang disebut *pancha mahabhuta*, yaitu *akasa (ether)*, udara (*bayu*), panas/ sinar (*teja*), air (*apah*), dan tanah/ zat padat (*pertiwi*). Dari sinilah timbul pandangan bahwa *Bhuana Agung* dan *Bhuana Alit* mempunyai sumber yang sama, yaitu berupa kelima *pancha* di atas.

Samadhi (2000) seorang peneliti yang lainnya, mengemukakan cara pandang yang sedikit berbeda dari Mulyadi (2004) tentang dasar filosofis tata ruang orang Hindu di Bali. Bila Mulyadi berpendapat bahwa untuk mengerti adat istiadat dan pola tata ruang orang Bali maka harus terlebih dahulu melalui pengetahuan tentang agama Hindu secara universal, maka hal ini hanya akan mengkesampingkan aspek kelokalan yang seharusnya lebih diutamakan. Menurut Samadhi (2000), untuk menemukan sumber



desain dari tata ruang di Bali harus dengan melihat aspek kelokalan, yaitu kebudayaan orang Bali yang tidak dapat ditemukan dimanapun selain di pulau ini.

Konsepsi Hindu Bali yang mengajarkan bahwa manusia selaku mikrokosmos harus senantiasa menyelaraskan dirinya dengan lingkungan sekitarnya selaku makrokosmos telah diaplikasikan dalam ke dalam struktur tata ruang. Dalam konteks kultur Bali, unit-unit permukiman yang dapat dianggap sebagai suatu entitas kosmos (*cosmological unit*) adalah banjar, desa adat, Pulau Bali dan dunia, dan di dalamnya berlaku konsep *luan teben* atau dikotomi ruang *sacred-profane* yang membuatnya menjadi unit ruang mandiri, sehingga entitas atau unit tersebut dapat dianggap sebagai suatu unit perencanaan dalam kepentingan perancangan ruang (Samadhi, 2004 : 124).

Dalam komunitas masyarakat desa-desa/kota di Bali (Mulaydi, 2004) terdapat tiga bentuk organisasi sosial yang cukup penting perannya, yaitu organisasi *subak*, organisasi *sekehe*, dan organisasi *banjar*. Ketiga bentuk organisasi tersebut dapat dilihat dari aktivitas-aktivitas kehidupan yang dilakukan masyarakat tersebut.

Organisasi *subak* adalah merupakan organisasi para pemilik ataupun penggarap sawah yang menerima air dari suatu irigasi bendungan tertentu. Kegiatannya di bidang pertanian baik berkaitan dengan ekonomi maupun dengan spiritual. Pimpinan organisasi subak pada tingkat banjar disebut *klian* subak yang dibantu oleh *sinoman* sebagai juru bicara (pemberi informasi). Pimpinan ini pada tingkat desa disebut *pekasih*, pada tingkat kota disebut *sedahan agung*. Organisasi *sekehe* adalah merupakan suatu organisasi atau kesatuan sosial yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu. Dasar keanggotaannya adalah sukarela. Ikatan suatu *sekehe* terbina oleh adanya tujuan bersama dan norma yang telah ditetapkan dan disepakati bersama. Eksistensi *sekehe* bisa permanen maupun sementara. Beberapa contoh *sekehe* adalah : *sekehe barong*, *sekehe gong*, *sekehe taruna-taruni*, *sekehe memula*, *sekehe ngerabin*, *sekehe manyi*, dan lain sebagainya. Organisasi *banjar* adalah merupakan suatu organisasi atau kesatuan sosial atas dasar ikatan wilayah dalam suatu desa/ kota. Pada umumnya desa/ kota di Bali memiliki *banjar* adat yang dipimpin oleh *klian* adat yang menguasai bidang adat dan agama, dan *banjar* dinas yang dipimpin oleh *klian* dinas yang mengurus bidang administrasi dan pembangunan dalam suatu *banjar*. Tujuan dari *banjar* adalah menciptakan suatu kerjasama di antara anggotanya dalam kehidupan seperti perkawinan, kematian, pembakaran jenazah atau *ngaben* dan lain sebagainya. Keanggotaan *banjar* bersifat suatu keharusan atau wajib bagi masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah teritorial *banjar*, terutama bagi anggota masyarakat yang sudah menikah.

Gelebet (1986) dan Budiharjo (1986) menegaskan bahwa pola keruangan permukiman Hindu Bali merupakan suatu bentuk pola keruangan dengan konsepsi *Tri Hita Karana*. Pengertian konsep *Tri Hita Karana* (Sekeha Demen, 2000) dikatakan bahwa *Tri* artinya tiga, *Hita* artinya kebahagiaan dan *Karana* artinya sebab, sehingga *Tri Hita Karana* secara leksikal berarti tiga hal yang menyebabkan kebahagiaan hidup manusia. *Tri Hita Karana* terdiri dari *Parahyangan* (Tuhan), *Pawongan* (Manusia) dan *Palemahan* (Lingkungan/ wilayah). Jadi hakikat dari konsep tersebut adalah konsep hubungan yang harmonis dan selaras antara; manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Pola tata ruang harus dapat menunjang peri kehidupan yang kompleks, sehingga pola tata ruang dibuat sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan kegunaannya tata ruang dalam tradisional Bali dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu tata ruang untuk keagamaan, tata ruang untuk perumahan dan permukiman serta tata ruang untuk fungsi-fungsi sosial (Bagus, 1990). Hal inilah menimbulkan ciri fisik kota yang khas di Bali, yaitu dengan adanya bangunan-bangunan tradisional seperti pura (bangunan suci bagi umat Hindu di Bali), puri (tempat kediaman bangsawan Bali) dan bangunan-bangunan lain yang berfungsi untuk kepentingan pemerintah, umum, maupun yang dimiliki oleh tiap-tiap kelompok masyarakat (Tabel 2.1).

**Tabel 2.1 *Tri Hita Karana* dalam Susunan Kosmos**

Susunan/Unsur	Jiwa/ Atma	Tenaga/ Prana	Fisik/ Angga
<b>Alam Semesta</b> ( <i>Bhuana Agung</i> )	<i>Paramatman</i> (Tuhan Yang Maha Esa)	Tenaga (yang menggerakkan alam)	Unsur-unsur <i>panca maha bhuta</i>
<b>Desa</b>	<i>Kahyangan-Tiga</i> (pura desa)	<i>Pawongan</i> (warga desa)	<i>Palemahan</i> (wilayah desa)
<b>Banjar</b>	<i>Parhyangan</i> (pura banjar)	<i>Pawongan</i> (warga banjar)	<i>Palemahan</i> (wilayah banjar)
<b>Rumah</b>	<i>Sanggah</i> (pemerajan)	Penghuni rumah	Pekarangan rumah
<b>Manusia</b> ( <i>Bhuana Alit</i> )	<i>Atman</i> (jiwa manusia)	Prana (tenaga <i>sabda bayu idep</i> )	<i>Angga</i> (badan manusia)

Sumber: Sulistyawati *et all* (1985:5); Meganada (1990:72) dalam Dwijendra (2004:33)

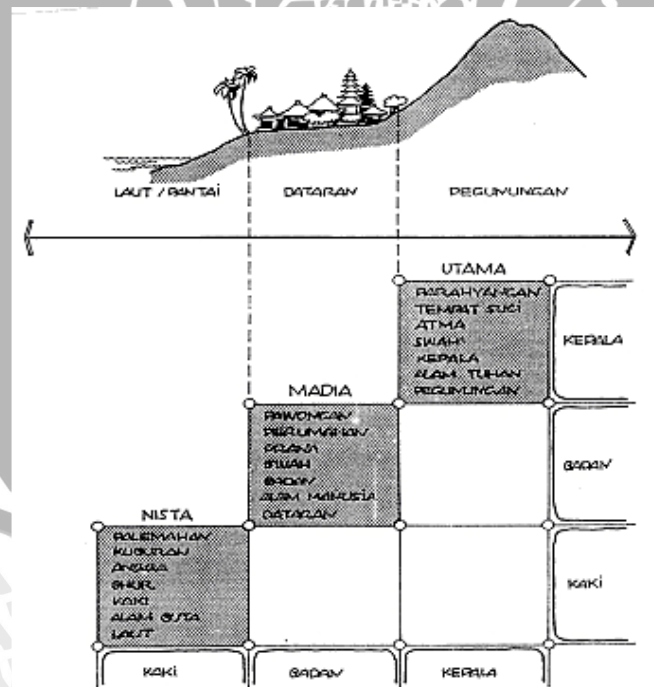
Tata ruang tradisional Bali berlaku dari lingkungan terbesar (makrokosmos) sampai ke tingkat ruang terkecil (mikrokosmos). Dalam konsep *Tri Hita Karana* : jiwa, fisik dan tenaga masing-masing disediakan ruangan seperti tempat ibadah keagamaan, tempat aktivitas kehidupan dan tempat-tempat pelayanan umum (Sumantra, 2003 :20).

*Tri Angga/ Tri Mandala* merupakan hasil dari konsep psiko-kosmik dan menjadi aplikasi bentuk *Tri Hita Karana*. *Tri Angga/ Tri Mandala* merupakan pembagian ruang berdasarkan kualitasnya, yaitu *utama mandala* (zona sakral/ suci), *madya mandala*

(zona netral), dan *nista mandala* (zona kotor). Konsep *Tri Mandala* pada dasarnya merupakan sistem pembagian area dalam usaha untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, dengan manusia lain dan dengan lingkungannya. Dalam lingkup permukiman, *utama mandala* adalah tempat suci/sakral, *madya mandala* adalah permukiman, dan *nista mandala* adalah makam/kuburan. Dalam lingkup wilayah, pembagiannya berturut-turut menjadi gunung, daratan dan laut (Samadhi, 2004 : 24).

Masyarakat Bali yang memiliki konsep *Segara-Gunung* (laut-gunung) sangat menghormati keberadaan laut dan gunung. Laut bagi masyarakat Bali merupakan tempat untuk menyucikan segala kekotoran yang ada di bumi, tempat mengembalikan segala sesuatu yang bersifat duniawi, sementara gunung merupakan tempat yang dianggap suci (istananya para dewa) dan tempat asal semua kehidupan.

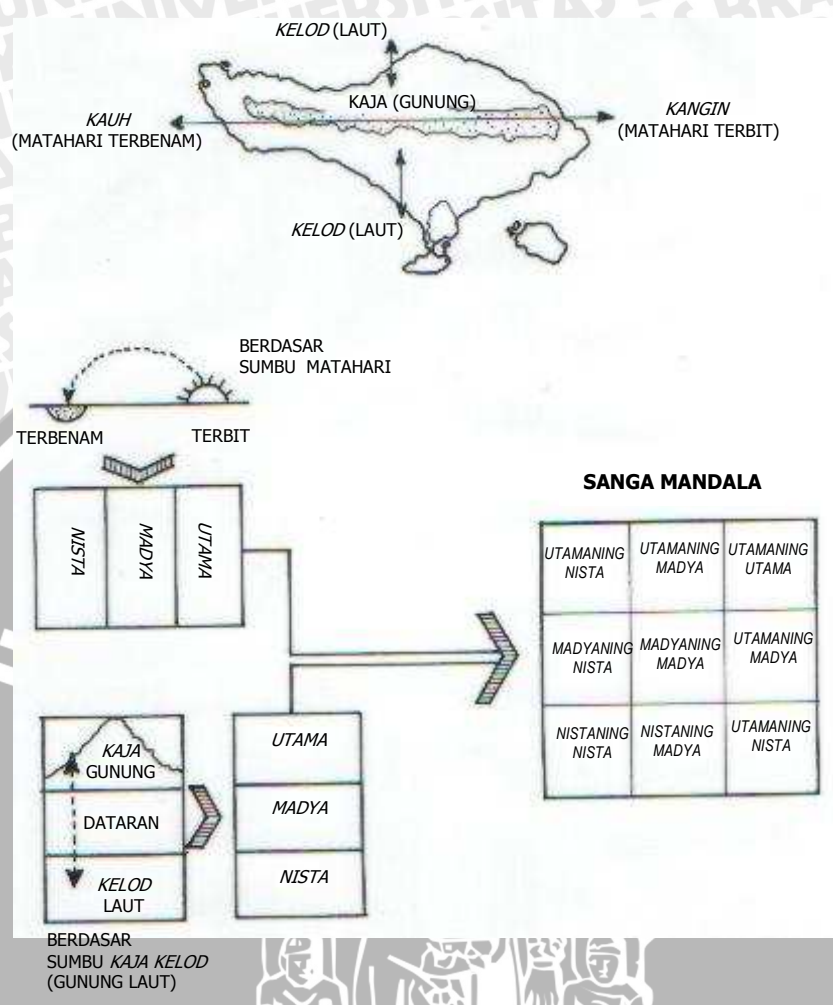
Orientasi dalam tata ruang tradisional Bali (Parimin, 1986) dibedakan menjadi dua, yaitu *kangin-kauh* (timur-barat) sebagai sumbu religi dan *kaja-kelod* (utara-selatan) sebagai sumbu bumi. Berdasarkan sumbu-sumbu tersebut, arah *kaja* (utara) dan *kangin* (timur) memiliki nilai utama, tengah memiliki nilai *madya* dan arah *kelod* (selatan) dan *kauh* (barat) memiliki nilai *nista*. Konsepsi Tri Angga dan Tri Hita Karana maupun konsepsi Tri Angga di Bali memiliki kedudukan sebagai konsep hirarki ruang (Gambar 2.2 dan Gambar 2.3).



Gambar 2.2 Konsepsi *Tri Angga/Tri Mandala* dan *Tri Hita Karana*.

Sumber : Eko Budihardjo dalam Sumantra (2003:21)

KONSEPSI ARAH ORIENTASI RUANG

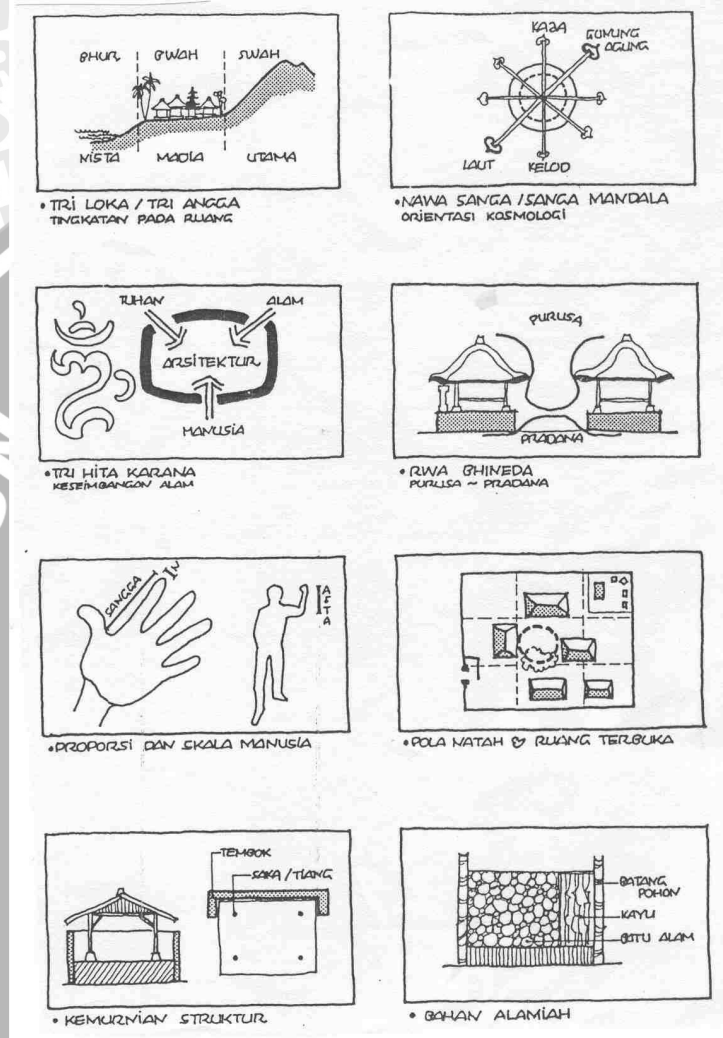


TRI LOKA	SHUAH LOKA	BHUAH LOKA	BHUR LOKA
<b>TRI ANGGA</b>	<b>UTAMA</b>	<b>MADYA</b>	<b>NISTA</b>
1. Semesta	Atmosfir	Litosfir	Hidrosfir
2. Bumi/ Dunia	Gunung (Untuk Dewa)	Tanah (Untuk Manusia)	Laut (Untuk Keburukan)
3. Desa/ Kota	Pura	Banjar	Kuburan
4. Rumah	Parahyangan/ Pamerajan/ Sanggah	Pawongan/ Natah	Palemahan/ Lebuh
5. Pura	Jero	Tengah	Jaba

Gambar 2.3 Konsep Tri Angga, sebagai konsep hirarki ruang.  
Sumber: Eko Budihardjo (1986: 50)

Konsep Rwa Bhineda, Tri Loka/ Tri Angga sampai konsep Nawa Sanga lebih menggambarkan pola struktur dan keterkaitan antar komponen struktur. Konsep Rwa Bhineda memberikan orientasi (yang disebut luan-teben, kaja-kelod) dan juga

laxokeroni (*sacred-profane*, baik-buruk). *Tri Angga* memberikan penjenjangan dan nilai terhadap struktur: *nista*, *madia*, *utama*. *Nawa sanga* memberikan kekuatan dan simbol terhadap struktur yang merupakan hasil kombinasi konsep *Tri Hita Karana*, *Tri Angga* dan arah orientasi ruang (Gambar 2.4).



Gambar 2.4 Konsep yang melandasi pola tata ruang tradisional Bali.  
 Sumber: Eko Budihardjo dalam Sumantra (2003:60)

Desa adat di Bali berdasarkan Perda Bali Nomor 3 Tahun 2001 mempunyai pengertian sebagai “...Kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu Bali secara turun-temurun dalam ikatan Khayangan Tiga atau Khayangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Konsep *Tri Angga/ Tri Mandala* membagi ruang menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

A. *Utama mandala*

*Utama mandala dalam konsep Tri Mandala*, adalah ruang yang khusus diperuntukkan bagi bangunan suci/ pura, dan lokasi-lokasi yang berkaitan dengan upacara keagamaan. Fungsinya adalah tempat melakukan hubungan dan pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa/ *Ida Sang Hyang Widhi Waca*.

Batas zona utama mandala ini dapat menggunakan radius kesucian pura yang dimaksudkan untuk menjaga wilayah pura dari berbagai perbuatan dan aktivitas yang tidak suci. Ukuran-ukuran radius kesucian pura secara tradisional seperti *apenimpug* (sejauh lemparan) atau *apanyengker* (seluas pagar pura) untuk pura desa, *apaneleng alit* (pandangan pendek) untuk *Dhang Kayangan* dan *apaneleng agung* (pandangan jauh) untuk *Sad Khayangan*. Untuk menyeragamkan ukuran tersebut dan menyesuaikan dengan ukuran internasional, Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 11/KEP/I/PHDIP/1994 tentang *Bhisama Kesucian Pura* dengan memberikan batasan mengenai ukuran tersebut, yakni untuk *Pura Sad Khayangan* dipakai ukuran *Apeneleng Agung* (minimal 5 Km dari Pura), untuk *Dang Khayangan* dipakai ukuran *Apeneleng Alit* (minimal 2 km dari Pura), dan untuk *Khayangan Tiga* dan lain-lain dipakai ukuran *Apenimpug* atau *Apanyengker*.

B. *Madya mandala*

*Madya mandala* dijabarkan sebagai ruang yang dialokasikan untuk kepentingan aktivitas manusia termasuk fasilitas umum di dalamnya sebagai wujud hubungan dan interaksi bersama antar sesama manusia. *Madya mandala* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tata ruang yang dialokasikan untuk kepentingan aktivitas pengunjung termasuk fasilitas pelayanan yang terdapat di dalamnya.

C. *Nista mandala*

*Nista mandala* merupakan ruang yang mempunyai tingkatan paling kotor, dan dalam pembahasan ini *nista mandala* ditekankan pada pembuangan/ akhir dari segala aktivitas manusia.

Samadhi (2000) memberikan tiga buah kesimpulan yang harus selalu diperhatikan di dalam pembangunan fisik di Provinsi Bali berdasarkan Konsep *Tri Hita Karana* di atas, yaitu sebagai berikut:

1. Desain tata ruang harus selalu memperhitungkan konsep dari ketradisional dan kerelegiusan masyarakat Hindu Bali sebagai dasar dari segala permulaan

desain pembangunan tata ruangnya. Hubungan antara konsep Mikrokosmos dan Makrokosmos adalah inti dari semua itu, sehingga konsep tata ruang yang biasa diaplikasikan di kota-kota seperti Jakarta, Melbourne dan lainnya harus segera disingkirkan. Publik akhirnya dapat melihat, pembangunan tata ruang Bali tak mungkin akan lepas dari konsepnya sendiri yang menjadi ciri khas, yang mampu mengharmoniskan manusia dan lingkungannya sedemikian rupa di dalam ciri khas Hindu Bali.

2. *Tri Hita Karana* adalah falsafah utama yang membentuk konsep psiko-kosmik dari harmoni keseimbangan di antara mikrokosmik (penduduk), Makrokosmik (Lingkungan biotik dan abiotik penduduk), dan Sang Penciptanya.
3. Falsafah religius tradisi tata ruang Bali di atas dapat lebih mudah diaplikasikan ke dalam desain tata ruang dengan hanya mengingat urutannya berdasarkan yang terpenting, yaitu 1) Falsafah Psiko-kosmiknya; 2) *Tri Hita Karana*; 3) *Tri Angga*; 4) *Kaja-Kelod*; 5) *Kangin-kauh*; 6) *Sanga Mandala*; 7) *Adat lokal (Tri Pramana dan Tri Masa)*.

#### **2.2.4 Tinjauan mengenai adat istiadat dan pola permukiman masyarakat muslim Sasak untuk studi Banjar Muslim Desa Tumbu Karangasem**

Masyarakat Sasak adalah suku asli yang menghuni Pulau Lombok/ Mataram dimana agama mayoritas (90%) di pulau yang terletak di sebelah timur Pulau Bali ini adalah Islam (terdapat derivat Islam lokal, yaitu aliran *watu telu*). Dari segi fisik, warna kulit orang Nusa Tenggara Barat asli (mayoritas etnis Sasak) berbeda dengan warna kulit orang Bali dan Bugis yang melayu kuning, pada umumnya orang NTB asli berkulit lebih gelap dan cenderung hitam. Di dalam keseharian, mereka menggunakan bahasa lokal dengan campuran bahasa Indonesia namun memiliki dialek yang sangat khas. Selain Sasak, etnis lain yang dapat dijumpai di pulau ini (minoritas) adalah Samawa yang berasal dari Sumbawa; Etnis Bima; Bugis serta Etnis Bali yang berdiam di beberapa desa di Lombok Barat. Suku bangsa yang terakhir, yaitu Bali, kebanyakan adalah keturunan dari masyarakat Hindu Karangasem yang menyeberang selat pada waktu terdahulu (Aulia 2006).

Pola permukiman masyarakat Sasak di tempat asalnya (Lombok) pada umumnya berkelompok padat, yang biasanya proses didirikannya dahulu bersumber dari satu leluhur. Dimulai dari rumpun keluarga, secara luas menjadi *repoq*, beberapa *repoq* menjadi dusun atau *dasan*, dan beberapa *dasan* menjadi desa membentuk perkampungan (Aulia, 2006). Pada permukiman Sasak yang ditata berdasarkan nilai

yang dianut, khususnya pengaruh kepercayaan masyarakat yang diwujudkan dalam senioritas pada keluarga dan tatanan ruang mereka, dapat dilihat bahwa dengan merujuk pada kepercayaan bahwa keselarasan hidup dapat dicapai dengan adanya kesinambungan antara manusia yang masih hidup dengan leluhur yang telah meninggal. Pola ini menjadikan senior dalam keluarga memegang peranan penting, dan hal ini diwujudkan dalam tatanan ruang mereka (Sasongko, 2005).

Hirsan (2005) menyatakan bahwa hubungan kekerabatan pada masyarakat Suku Sasak merupakan bagian dari faktor yang mempengaruhi tempat tinggal. Masyarakat Sasak hidup secara kolektif dengan menempati suatu lahan, tempat para penghuninya masih memiliki hubungan darah. Masyarakat pedesaan pada umumnya, seperti pada masyarakat Sasak memiliki kecenderungan untuk bertempat tinggal atau membangun rumah dekat dengan saudar-saudaranya. Adanya anggapan bahwa selain dapat mempererat hubungan silaturahmi, juga berfungsi untuk lebih mempermudah komunikasi dan memudahkan tindakan jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Keterkaitan ini akan membentuk suatu pola bermukim yang disebut istilah rumpun.

Tempat Ibadah tidak bisa dilepaskan dari pola permukiman dan budaya orang-orang Sasak dalam kesehariannya, pada umumnya seluruh lapisan etnis lain seperti Hindu di Lombok juga memandang sama tempat Ibadah sebagai kesatuan terpenting dari tata ruang mereka. Tak heran bila Lombok, dengan agama Islamnya yang menjadi mayoritas, memiliki julukan sebagai Pulau Seribu Masjid (SuaraNTB, 2004). Berkaitan dengan tempat ibadah, di beberapa komunitas penduduk tradisional suku Sasak di Pulau Lombok, umumnya terdapat sebuah bangunan yang menyerupai rumah besar yang disebut *bale beleq*. Bangunan ini memiliki fungsi yang hampir sama antara satu dengan lainnya. *Bale beleq* yang berada di satu wilayah pun memiliki keterkaitan budaya yang erat dengan komunitas penduduk tradisional di wilayah lain sebagai tempat untuk tafakkur, beristikhrah, hingga tempat pelaksanaan upacara tradisional yang berupa tolak bala (SuaraNTB, 2006).

## **2.3 Pelestarian**

### **2.3.1 Definisi pelestarian**

Di setiap redaksional yang dijabarkan di dalam sebuah definisi tentang pelestarian itu sebenarnya adalah sebuah konsep dan rumusan mengenai pelestarian itu sendiri, bagaimana suatu masalah bisa dikaitkan dengan pelestarian adalah tergantung dari kata di dalam definisi tersebut. Para pakar pelestarian berusaha untuk merumuskan



definisi pelestarian setepat mungkin agar suatu objek yang sebenarnya membutuhkan pelestarian tidak luput dari pengamatan para peneliti sejarah dan pemerhati cagar budaya, dan mampu ditangani dengan benar. Hal ini menjelaskan mengapa terdapat beraneka ragam definisi dari pelestarian. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut:

- a. Dobby (1978), mendefinisikan pelestarian (bahasa Inggris: *preservation*) sebagai upaya mempertahankan kerangka (struktur) bangunan-bangunan dan lingkungan/ kawasan pada keadaan saat ini, tanpa ada perubahan berarti pada tata ruang dalam (*interior*) dan tata ruang luar (*exterior*). Usaha pelestarian ini terbatas pada perlindungan (*protection*), pemeliharaan atau penjagaan (*maintenance*) dan bila mungkin stabilisasi dari kondisi bangunan yang ada tanpa mengurangi/ memutar balikkan (*distortion*) arti kata atau nilai budayanya.
- b. Fitch (1982), mengungkapkan bahwa pelestarian adalah suatu usaha untuk memelihara artefak dalam kondisi fisik yang sama ketika diterima oleh agen pemelihara. Tidak ada penambahan atau pengurangan dari nilai estesisnya.
- c. Piagam Pelestarian Pusaka Indonesia (2003), berisi definisi tentang pelestarian, yaitu adalah upaya pengelolaan pusaka melalui kegiatan penelitian, perencanaan, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pengawasan dan atau pengembangan secara selektif untuk menjaga kesinambungan, keserasian dan daya dukungnya dalam menjawab dinamika jaman untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih berkualitas.
- d. Pontoh (1992), mengemukakan bahwa konsep awal pelestarian adalah konservasi, yaitu pengawetan benda-benda, monumen, dan sejarah. Perkembangan lingkungan perkotaan perkotaan yang memiliki nilai sejarah serta kelangkaan menjadi dasar bagi suatu tindakan konservasi.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dalam studi ini dapat disimpulkan pelestarian adalah upaya untuk melindungi bangunan atau lingkungan kuno sesuai dengan keadaanya, mengoptimalkan dan memanfaatkan sesuai dengan fungsi lama atau menentukan fungsi baru yang dapat meningkatkan kualitas bangunan maupun lingkungan sekitarnya yang bertujuan untuk memahami masa lalu dan memperkaya masa kini melalui penerapan berbagai bentuk pelestarian.

### 2.3.2 Undang-undang pelestarian

Peraturan perundang-undangan mengenai pelestarian atau perlindungan terhadap bangunan, lingkungan atau kawasan kuno-bersejarah sebenarnya telah lama dibuat. Peraturan tersebut adalah *Monument Ordonantie* Stbl. 238/1931 (M.O.1031). Namun,

peraturan ini tidak dipakai lagi dan digantikan dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Perlindungan dan pelestarian benda cagar budaya dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa harus dilakukan karena merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan kemudian yang dimaksud dengan benda cagar budaya menurut UU No. 5 Tahun 1992, adalah sebagai berikut:

1. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian lainnya; atau sisa-sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun, atau mewakili masa/ gaya yang khas sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
2. Benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan; dan
3. Situs atau lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda cagar budaya termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamannya.

### **2.3.3 Ragam pelestarian**

Kegiatan pelestarian juga dapat berbentuk usaha seperti konservasi dan revitalisasi yang dimuat dalam prinsip pelestarian, dan pelestarian itu sendiri secara teknis merupakan suatu konsep yang lebih luas dari itu dan berada di atasnya. Lingkup pelestarian sendiri menurut Charter (1981), Catanese (1979), Piagam Burra (1981) mengatur hal-hal sebagai berikut (Tabel 2.2):

1. Konservasi, didefinisikan sebagai semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat guna mempertahankan nilai kulturnya. Konservasi mencakup pemeliharaan sesuai situasi dan kondisi setempat, dan dapat meliputi preservasi, restorasi, rekonstruksi maupun adaptasi. Umumnya konservasi yang dilakukan merupakan gabungan dua atau lebih upaya tersebut. Tujuannya, agar bangunan yang dilestarikan menjadi lebih efisien serta perkembangannya lebih terarah. Dengan demikian, maka perubahan tempat-tempat menarik tetap mengacu pada nilai kesejarahannya.
2. Preservasi adalah upaya melindungi bangunan, monumen dan lingkungan dari kerusakan serta mencegah proses kerusakannya. Dalam Piagam Burra disebutkan bahwa preservasi adalah pemeliharaan suatu tempat tetap sesuai aslinya serta mencegah proses kerusakan.

3. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi fisik bangunan seperti semula dengan membuang elemen tambahan serta memasang kembali elemen orisinal yang telah hilang tanpa menggunakan bahan baru.
4. Rehabilitasi adalah mengembalikan kondisi bangunan rusak atau menurun, sehingga berfungsi lagi seperti semula.
5. Renovasi adalah upaya merubah sebagian atau seluruh interior bangunan, sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan bersangkutan terhadap fungsi baru.
6. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan atau membangun kembali penampilan asli suatu kawasan atau bangunan sesuai informasi kesejarahan yang diketahui.
7. Adaptasi adalah segala upaya dalam mengubah suatu tempat agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.

Beberapa komponen yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. *Redevelopment*, merupakan upaya penataan kembali kawasan kota melalui pembongkaran sebagian atau seluruh kawasan tersebut. Perubahan yang terjadi biasanya terdiri dari peruntukan lahan, profil sosio ekonomi, ketentuan dan intensitas pembangunan baru.
2. Gentrifikasi, merupakan usaha peningkatan vitalitas, peningkatan kualitas lingkungan tanpa menimbulkan perubahan berarti dari struktur fisik suatu kawasan. Usaha ini dapat dilakukan dengan program rehabilitasi atau renovasi tanpa melakukan pembongkaran berarti.

Tabel 2.2 Teknik Pelestarian Bangunan

No.	Jenis Pelestarian	Definisi	Standar Pengerjaan	Keterangan
1.	Konservasi	Semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat guna mempertahankan nilai budayanya, dengan tetap mememanfaatkannya untuk mewadahi kegiatan yang sama dengan aslinya atau untuk kegiatan yang sama sekali baru untuk membiayai sendiri kelangsungan keberadaannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kegiatan konservasi mencakup pemeliharaan sesuai kondisi setempat.</li> <li>▪ Konservasi suatu tempat merupakan suatu proses daur ulang dari sumber daya tempat tersebut.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konservasi sebenarnya merupakan upaya preservasi, tetapi tetap memperlihatkan dan memanfaatkan suatu tempat untuk menampung dan mewadahi kegiatan baru, sehingga kelangsungan tempat bersangkutan dapat dibiayai sendiri dari pendapat kegiatan baru.</li> <li>▪ Dapat meliputi preservasi, restorasi, renovasi, rekonstruksi maupun adaptasi.</li> <li>▪ Secara fisik, strategi ini mengakibatkan adanya perubahan fisik pada bangunan (tingkat perubahan kecil).</li> </ul>
2.	Preservasi	Merupakan upaya pelestarian lingkungan binaan tetap pada kondisi aslinya yang ada dan mencegah terjadinya proses rusaknya.	<p>Tindakan yang dapat dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemeliharaan berkala;</li> <li>▪ Pengecatan bangunan secara rutin;</li> <li>▪ Penggantian bangunan yang telah rusak/ lapuk;</li> <li>▪ Penambahan ornamen pada bangunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secara fisik, strategi ini nyaris tidak mengakibatkan adanya perubahan atau sedikit sekali menimbulkan perubahan pada fisik bangunan (tingkat perubahan tidak ada/ sangat kecil).</li> <li>▪ Preservasi termasuk dalam cakupan konservasi.</li> <li>▪ Tergantung pada kondisi bangunan atau lingkungan yang akan dilestarikan, maka upaya preservasi biasanya disertai pula dengan upaya restorasi, dan atau rekonstruksi.</li> </ul>
3.	Restorasi (pemugaran)	Upaya pengembalian kondisi suatu tempat atau fisik bangunan pada kondisi asalnya dengan membuang elemen-elemen tambahan dan memasang kembali bagian-bagian asli yang telah rusak atau menurun tanpa	Teknik ini biasa dilakukan pada bangunan atau kawasan lama yang telah mengalami perubahan (kerusakan atau penambahan) dan pengganti yang sama masih tersedia serta mudah mendapatkannya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Restorasi termasuk bentuk pelestarian yang paling konservatif.</li> <li>▪ Contoh: The Rock di Sydney, bekas kompleks penjara yang dijadikan kawasan pertokoan.</li> </ul>

Lanjutan Tabel 2.2 Teknik Pelestarian Bangunan

No.	Jenis Pelestarian	Definisi	Standar Pengerjaan	Keterangan
4.	Rehabilitasi	menambah unsur/ elemen baru ke dalamnya. Pengembalian kondisi bangunan yang telah rusak atau menurun, sehingga dapat berfungsi kembali seperti sedia kala.	Mementingkan bentuk bangunan asalnya, sehingga upaya penggantian terhadap elemen yang rusak dapat saja dilakukan dengan jenis bahan yang lain asal masih serasi dengan bahan lama yang masih ada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Secara fisik, strategi ini mengakibatkan adanya perubahan fisik pada bangunan (tingkat perubahan sedang).</li> <li>Dapat mencakup alih guna bangunan (<i>adaptive reuse</i>) utama menjadi bangunan dengan fungsi baru.</li> </ul>
5.	Renovasi (perombakan)	Tindakan mengubah sebagian maupun keseluruhan bangunan, terutama interior bangunan, sehubungan dengan adaptasi bangunan tersebut terhadap bangunan baru, konsep-konsep modern atau dalam menampung fungsi baru..	Cara ini biasanya dilengkapi dengan pembuatan dokumen dari bangunan lama yang dirombak, dan penyelamatan terhadap beberapa bangunan dan objek – objek atau potongan-potongan (ornamen atau ciri lainnya) yang merupakan benda langka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Upaya ini biasanya disertai dengan konservasi dan gentrifikasi suatu bangunan atau lingkungan.</li> <li>Teknik ini dapat pula berupa perombakan bangunan atau kawasan lama yang didasarkan pada pertimbangan bahwa perombakan merupakan satu-satunya cara untuk memperpanjang umur bangunan, yaitu dengan membuat bangunan baru yang memperhatikan keserasian dengan bentuk bangunan lama di sekitarnya.</li> <li>Contoh; Bank Perniagaan dan Bank Nasional di Kota Bandung.</li> </ul>
6.	Rekonstruksi	Upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali semirip mungkin dengan penampilan orisinil yang diketahui.	Teknik ini dapat berupa relokasi, yaitu membuat tiruan atau memindahkan bangunan di/ ke tempat lain yang dianggap lebih aman. Hal demikian dapat dilakukan jika bangunan yang perlu dilindungi tersebut mempunyai tingkat kepentingan tinggi untuk dilindungi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam proses rekontruksi bangunan dapat digunakan bahan baru atau lama.</li> <li>Proses ini biasanya untuk mengadakan kembali bangunan atau kawasan yang telah sangat rusak atau bahkan yang telah hampir punah sama sekali.</li> </ul>
7.	Adaptasi (penyesuaian)	Segala upaya dalam mengubah suatu tempat, untuk menyesuaikan diri dengan fungsi baru yang menggantikannya.	Melakukan sedikit perubahan terhadap bangunan dan kawasan peninggalan sejarah yang dilestarikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cara ini biasanya sangat mempengaruhi interior bangunan.</li> </ul>
8.	<i>Redevelopment</i>	Upaya penataan kembali kawasan		

Lanjutan Tabel 2.2 Teknik Pelestarian Bangunan

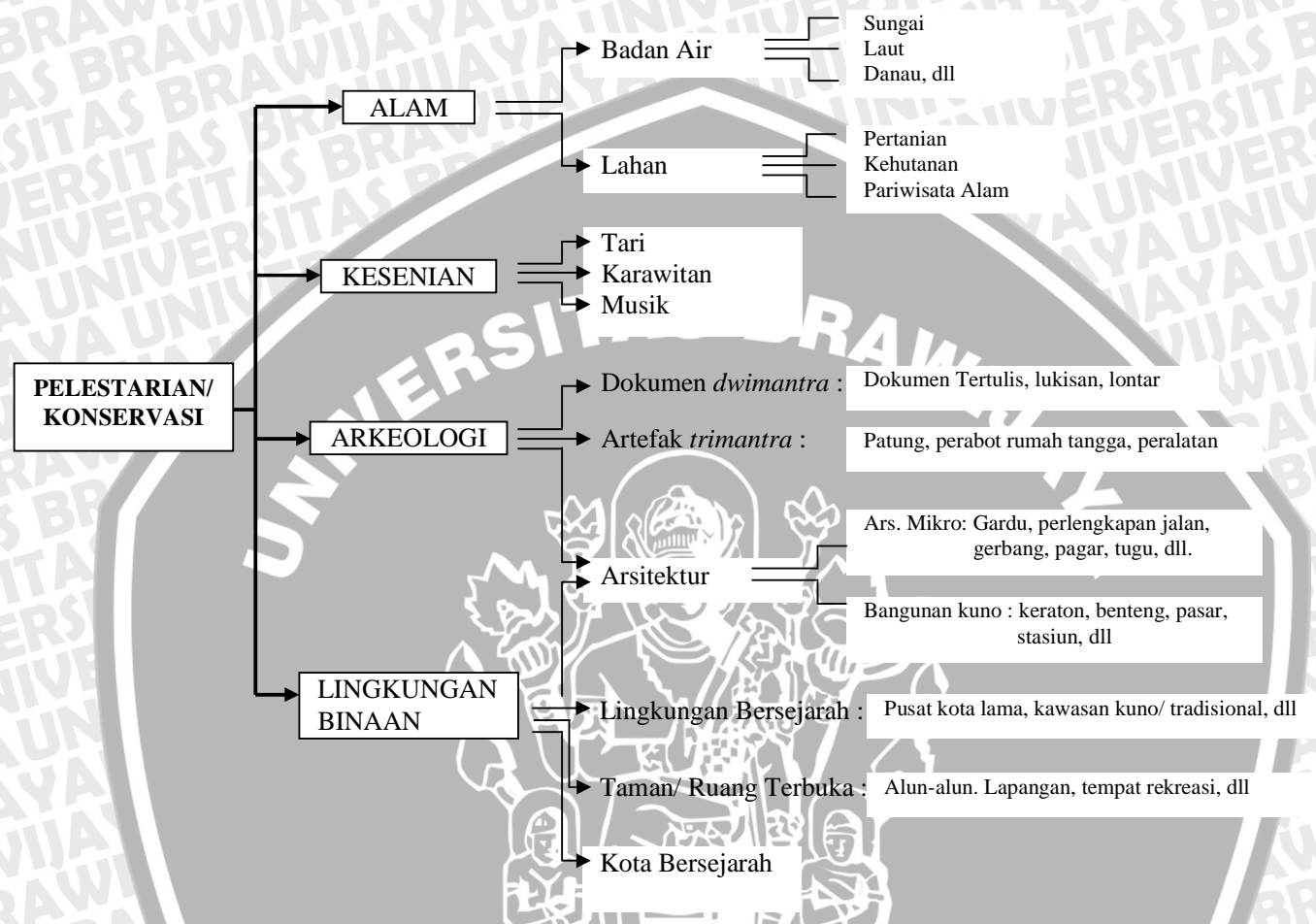
No.	Jenis Pelestarian	Definisi	Standar Pengerjaan	Keterangan
9.	Gentrifikasi	kota melalui pembongkaran sebagian atau seluruh kawasan tersebut Usaha peningkatan vitalitas, peningkatan kualitas lingkungan tanpa menimbulkan perubahan berarti dari struktur fisik suatu kawasan	Teknik ini dapat dilakukan dengan program rehabilitasi atau renovasi tanpa melakukan pembongkaran berarti	
10.	Replikasi (peniruan)	Pembangunan bangunan baru yang meniru unsur-unsur atau bentuk-bentuk bangunan lama yang sebelumnya ada tetapi sudah musnah.	Dapat diterapkan untuk penambahan bangunan baru di sekitar bangunan atau kawasan peninggalan sejarah, yang dilakukan dengan memberikan persyaratan khusus pada bangunan baru tersebut, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pembatasan tinggi, volume;</li> <li>▪ Garis muka bangunan;</li> <li>▪ Bahan bangunan, warna; dan</li> <li>▪ Gaya/ langgam elemen bangunannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Secara umum teknik ini dilakukan untuk bangunan atau kawasan peninggalan sejarah yang selalu berkembang dan disekitarnya cukup tersedia lahan untuk pembuatan bangunan tambahannya.</li> <li>▪ Contoh: Gedung Sate di Bandung.</li> </ul>
11.	Substitusi (pengalih-fungsian bangunan)	Upaya mengganti fungsi bangunan bersejarah dengan status baru untuk meningkatkan kembali nilai dan fungsinya sesuai dengan kepentingan dan jamannya.	Teknik ini dilakukan bila bangunan/ kawasan yang akan dilestarikan mempunyai kepentingan perlindungan yang sangat tinggi, sehingga sejauh mungkin dihindarkan perubahan.	
12.	Benefisasi	Upaya meningkatkan manfaat suatu bangunan bersejarah yang semula tidak menarik menjadi berfungsi untuk kepentingan hidup manusia baik untuk kepentingan pendidikan, penelitian, pariwisata dan rekreasi.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dapat dilakukan dalam bentuk penggunaan untuk perpustakaan, museum atau pendidikan yang sesuai dengan sejarah dan bentuk bangunannya.</li> </ul>
13.	Perlindungan wajah bangunan	Metode yang dilakukan bila ciri utama dari bangunan lama yang perlu dilestarikan terletak pada	Dilakukan pada bagian dalam atau belakang bangunan, sedangkan wajah bangunan tetap dipertahankan. Hal ini terutama dilakukan jika	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contoh: bangunan Hotel Prenger di Jl. Asia Afrika, Bandung.</li> </ul>

Lanjutan Tabel 2.2 Teknik Pelestarian Bangunan

No.	Jenis Pelestarian	Definisi	Standar Pengerjaan	Keterangan
		wajah bangunannya. Perombakan umumnya dilakukan pada bagian dalam atau belakang bangunan, sedangkan wajah bangunan tetap dipertahankan.	intensitas masukan pada bangunan tersebut cukup tinggi dan perubahan tidak bisa dihindarkan.	
14	Perlindungan <i>sky line</i> (garis cakrawala) atau ketinggian bangunan	Upaya yang dilakukan apabila bangunan/ kawasan peninggalan sejarah yang akan diubah terletak di sekitar suatu ciri lingkungan sejak lama terbentuk di kota tersebut.	Dilakukan dengan membatasi ketinggian bangunan baru yang akan dibangun disekitar ciri lingkungan tersebut, sehingga tidak mengganggu pandangan kearahnya (dalam hal ini termasuk pandangan ke garis cakrawala di sekitar kawasan tersebut).	
15	Perlindungan objek atau potongan	Upaya yang dilakukan terhadap ciri utama dari bangunan yang akan dirombak atau dihancurkan, sehingga perombakan yang dilakukan masih memperlihatkan bahwa pernah ada suatu bangunan atau kawasan lama tersebut.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Teknik ini hanya dilakukan dalam keadaan mendesak, yaitu bila keutuhan bangunan sudah tidak dapat dipertahankan dan membahayakan keselamatan penghuninya.</li> </ul>
16	Demolisi	Upaya penghancuran atau perombakan suatu lingkungan binaan yang sudah rusak atau membahayakan.		

Sumber: Rakhmawati (2005: 44-46) dalam Patimah (2006:57-60); dan hasil studi pustaka, 2008

Sidartha & Budihardjo (1989) menyusun sebuah skema mengenai objek pelestarian (diasosiasikan dengan konservasi) yang ada pada Gambar 2.5 berikut ini:



Gambar 2.5 Jenis objek pelestarian.  
Sumber : Sidartha & Budihardjo (1989: 10)

Menurut Antariksa (2004), konservasi atau pelestarian dalam bidang arsitektur dan lingkungan binaan, berawal dari konsep preservasi yang bersifat statis. Kemudian berkembang menjadi konsep konservasi yang lebih luas, dan pada akhirnya, konservasi menjadi payung dari segenap kegiatan pelestarian lingkungan binaan yang mencakup *preservasi, restorasi, rehabilitasi, rekonstruksi, adaptasi* dan *revitalisasi*. Tujuannya untuk memelihara bangunan dan lingkungan, agar makna kulturalnya berupa; nilai keindahan, sejarah, keilmuan, atau nilai sosial untuk generasi lampau, masa kini dan masa yang akan datang dapat terpelihara



Dalam penjabaran konsep tersebut, maka terlebih dahulu perlu dirumuskan tolak ukur, kriteria dan motivasi dari kegiatan pelestarian yang akan dilaksanakan, yaitu sebagai berikut:

#### **A. Tolak ukur pelestarian**

Menurut Hatmoko (1994), dalam melestarikan kawasan cagar budaya, secara umum tindakan pelestarian dapat dilakukan dengan cara ketat, pelestarian dengan arahan, dan pelestarian untuk faktor-faktor tertentu. Tindakan pelestarian dapat digambarkan mengenai objek-objek berdasarkan komponen fisik dan non fisik, sebagai berikut:

Komponen fisik:

1. Komponen fisik abiotis, tindakan pelestarian dapat dilakukan terhadap keseluruhan kawasan atau bagian dari suatu kawasan, keseluruhan site/ tapak atau pada lokasi situs, bangunan atau kumpulan bangunan, serta komponen-komponen bangunan atau perabot.
2. komponen fisik biotis, yang meliputi misalnya tanaman langka ataupun pemeliharaan binatang yang dapat mencitrakan suatu suasana tertentu, dengan perlu melihat konteks lingkungan yang sudah ada, sehingga diharapkan faktor-faktornya tidaklah mengada-ada.

Komponen non fisik:

1. Kesenian, yang dapat berupa kesenian baru ataupun lama;
2. Kerajinan, yang mungkin telah berkembang pesat, ataupun baru dalam tahap pengembangan; dan
3. Tradisi, yang merupakan tindakan sosial-kemasyarakatan yang diturunkan terus menerus.

#### **B. Kriteria pelestarian**

Dalam menentukan tindakan pelestarian, perlu dilakukan pengkajian terhadap kriteria-kriteria pelestarian yang telah digunakan di beberapa tempat/kawasan lain (studi-studi terdahulu). Berikut ini adalah kriteria-kriteria pelestarian yang telah ditetapkan untuk masing-masing kawasan studi, antara lain:

1. Fuady, (1999:22), menetapkan kriteria pelestarian dalam penelitian di kawasan segi empat tunjungan Kota Surabaya, adalah sebagai berikut:
  - a. Peran sejarah, berkaitan dengan peristiwa bersejarah sebagai ikatan simbolis dahulu dan sekarang, baik yang terkait dengan perjuangan 1945, sejarah perkembangan kawasan, maupun sejarah perkembangan kota;

- b. Keluarbiasaan, terkait dengan kekhususan atau keunikan yang dimiliki objek pelestarian dibandingkan dengan objek di sekitarnya berdasarkan unsur-unsur seperti terlangka, tertua, terbesar, terpanjang, pertama dalam jenisnya;
  - c. Memperkuat citra, berkaitan dengan peran kehadiran objek pelestarian yang dapat meningkatkan citra dan kualitas kawasan, bangunan menjadi acuan bagi warga kota atau sebagai tetenger kawasan;
  - d. Estetika, berkaitan dengan nilai estetika dan arsitektural dalam hal bentuk, struktur, tata ruang, dan ornamen;
  - e. Keaslian, terkait dengan seberapa besar perubahan yang terjadi terhadap bentuk asli bangunan, fasade, warna, dan atap bangunan;
  - f. Keterawatan, terkait dengan kondisi bangunan yang ditempati dalam keadaan terawat, kosong/tidak ditempati namun kondisinya baik, ataupun rusak dan terabaikan.
2. Pamungkas (1998:41), menentukan kriteria-kriteria pelestarian dalam penelitian di kawasan pusat Kota Pasuruan yang diukur berdasarkan perbandingan antar objek studi dalam skala lokal Kota Pasuruan, adalah sebagai berikut:
- a. Estetika, berkaitan dengan nilai keindahan dan arsitektural dalam hal bentuk struktur, tata ruang, dan ornamen khususnya dalam hal penampakan luar bangunan;
  - b. Keluarbiasaan, berkaitan dengan nilai keistimewaan, keunikan, dan kelangkaan bangunan yang potensial menjadi *landmark* suatu kawasan, mungkin sebagai satu-satunya yang tersisa, tertua, berdimensi skala monumental (baik bangunan maupun ruang luarnya), atau peletakannya yang menonjol;
  - c. Memperkuat citra kawasan, berkaitan dengan pengaruh kehadiran objek pelestarian terhadap kawasan sekitarnya yang sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan sekitarnya, baik yang dibentuk oleh kejamakan, kesatuan, kontinuitas, atau kontrasan bangunan;
  - d. Keaslian bentuk, berkaitan dengan tingkat perubahan bentuk fisik luar dan/atau dalam bangunan, baik melalui penambahan atau pengurangan jumlah ruang, elemen-elemen struktural, konstruksi, detil-detil ornamennya;
  - e. Keterawatan, berkaitan dengan kondisi fisik bangunan seperti tingkat kerusakan, prosentase yang tersisa, dan kebersihan;

- f. Peran sejarah, berkaitan dengan nilai sejarah yang dimiliki, suatu peristiwa penting yang mencatat peran ikatan simbolis suatu rangkaian sejarah dan babak perkembangan baik kota, arsitektur, maupun perjuangan bangsa.
3. Suryawan, (2001:11-20), menentukan kriteria-kriteria pelestarian dalam penelitian di kawasan Kota Lama Surabaya, adalah sebagai berikut:
    - a. Kelangkaan, sebagai peninggalan terakhir atau yang jarang sekali terdapat tipe bangunan yang masih ada (beserta keunikan dan kemewahan visualnya);
    - b. Keluarbiasaannya, ditentukan oleh keistimewaan dalam hal ketuaan, dimensi, penonjolan, dan sebagainya yang dapat dipakai sebagai tanda atau ciri suatu kawasan;
    - c. Kejamakan, ditentukan oleh seberapa jauh suatu objek pelestarian akan mewakili suatu ragam, jenis khusus yang spesifik, atau melambangkan suatu tradisi kebudayaan;
    - d. Peranan sejarah, berkaitan dengan nilai sejarah yang dimiliki dan patut diperhatikan, suatu peristiwa penting yang mencatat peran ikatan simbolis suatu rangkaian sejarah;
    - e. Memperkuat kawasan, berkaitan dengan pengaruh kehadiran objek pelestarian terhadap kawasan sekitarnya yang sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan;
    - f. Estetika, berkaitan dengan nilai keindahan arsitektural yang tinggi dan patut dicontoh baik dalam hal bentuk, struktur, tata ruang, maupun ornamennya.
  4. Nurmala (2003:98-99), menentukan kriteria-kriteria pelestarian dalam penelitian di kawasan Pecinan, pasar baru kota Bandung, adalah sebagai berikut:
    - a. Estetika/arsitektonis, berkaitan dengan nilai estetis dan arsitektural, meliputi bentuk, gaya, struktur, tata ruang, ornamen. Bangunan atau bagian dari kota mewakili prestasi khusus atau gaya-gaya sejarah tertentu;
    - b. Keselamatan, kondisi bangunan kuno yang sudah lama, tentunya mengakibatkan konstruksinya yang rapuh akibat usia, untuk itu perlu diperhatikan pemeliharaan bangunan kuno agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan keselamatan penghuni maupun masyarakat di lingkungan sekitar bangunan tersebut;
    - c. Kejamakan/tipikal, objek yang akan dilestarikan mewakili kelas dan jenis khusus, tipikal yang cukup berperan. Tolak ukur kejamakan ditentukan pada bentuk suatu ragam atau jenis khusus yang spesifik;

- d. Kelangkaan, kelangkaan suatu jenis karya yang mewakili sisa dari warisan peninggalan terakhir dari gaya yang mewakili jamannya, yang tidak dimiliki daerah lain;
  - e. Keluarbiasaan/ keistimewaan, suatu objek konservasi yang memiliki bentuk paling menonjol, tinggi, dan besar. Keistimewaan memberi tanda atau ciri suatu kawasan tertentu;
  - f. Peranan sejarah (nilai historis), lingkungan kota atau bangunan yang memiliki nilai historis suatu peristiwa yang mencatat peranan ikatan simbolis suatu rangkaian sejarah masa lalu dan babak perkembangan suatu kota untuk dilestarikan dan dikembangkan;
  - g. Penguat karakter kawasan, kehadiran suatu objek atau kehadiran suatu karya akan mempengaruhi kawasan-kawasan sekitar dan bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan.
5. Waloejo (1998:6-7), menentukan kriteria-kriteria pelestarian dalam penelitian di kawasan Trunojoyo kota Malang, adalah sebagai berikut:
- a. Peran sejarah, berkaitan dengan pariwisata bersejarah sebagai kaitan simbolis peristiwa dulu dengan sekarang;
  - b. Kelangkaan, merupakan bangunan yang langka dan tidak terdapat di daerah lain;
  - c. Keistimewaan, memiliki kekhasan seperti tertua, terbesar, terlama, terpanjang, dan sebagainya;
  - d. Estetika, berkaitan dengan nilai estetis dan arsitektonis yang tinggi dalam bentuk struktur, tata ruang, dan ornamennya;
  - e. Kejamakan, ditekankan pada seberapa jauh karya arsitektur tersebut mewakili suatu ragam atau jenis khusus yang spesifik;
  - f. Pengaruh terhadap lingkungan, peran kehadiran objek pelestarian untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan sekitarnya.

Beberapa pustaka, yaitu Dobby *dalam* Erwin (2000), Catanese (1986), Pontoh (1992), Rypkema *dalam* Tiesdell (1992), kriteria yang menggambarkan dasar-dasar pertimbangan mengapa suatu objek perlu dilestarikan, antara lain (Nurmala, 2003: 31-36):

- a. Dobby *dalam* Erwin (2000) menyebutkan ada beberapa kriteria umum yang biasa digunakan untuk menentukan objek yang perlu dilestarikan antara lain:

- Estetika, Bangunan-bangunan atau bagian dari kota yang dilestarikan karena mewakili prestasi khusus dalam suatu gaya sejarah tertentu. Tolak ukur estetika ini dikaitkan dengan nilai estestis dan arsitektonis yang tinggi dalam hal bentuk, struktur, tata ruang dan ornamennya.
  - Kejamakan, Bangunan-bangunan atau bagian kota yang dilestarikan karena mewakili satu kelas atau jenis khusus bangunan yang cukup berperan. Dengan demikian tolak ukur kejamakan ditekankan pada seberapa jauh karya arsitektur tersebut mewakili suatu ragam atau jenis khusus yang spesifik.
  - Kelangkaan, Bangunan yang hanya satu dari jenisnya atau merupakan contoh terakhir yang masih ada. Jadi termasuk karya yang sangat langka atau bahkan satu-satunya di dunia, tidak dimiliki daerah lain.
  - Sejarah, Bangunan-bangunan dan lingkungan perkotaan yang pernah menjadi lokasi bagi peristiwa-peristiwa bersejarah yang penting untuk dilestarikan sebagai ikatan simbolis antara peristiwa dahulu dan sekarang.
  - Pengaruh dari kawasan sekitar, bangunan-bangunan dan bagian kota yang karena investasi di dalamnya akan mempengaruhi kawasan-kawasan di dekatnya, atau kehadirannya sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan sekitarnya.
  - Keistimewaan, Bangunan-bangunan yang dilindungi karena memiliki keistimewaan misalnya yang terpanjang, tertinggi, terbesar, yang pertama dan lain sebagainya.
- b. Catanese (1986) merumuskan kriteria yang digunakan dalam menentukan objek konservasi sebagai berikut:
- Estetika, berkaitan dengan nilai arsitektural, meliputi bentuk, gaya, struktur, tata kota, mewakili prestasi khusus atau gaya sejarah tertentu.
  - Kejamakan, objek yang akan dilestarikan mewakili kelas dan jenis khusus. Tolak ukur kejamakan ditentukan oleh bentuk suatu ragam atau jenis khusus.
  - Kelangkaan, suatu jenis karya yang merupakan sisa warisan peninggalan terakhir dari gaya tertentu mewakili zamannya dan tidak dimiliki daerah lain.
  - Keluarbiasaan/keistimewaan, misalnya bentuk menonjol, tertinggi, terbesar, yang pertama dan sebagainya. Keistimewaan itu memberi tanda atau ciri kawasan tertentu.

- Peranan sejarah, lingkungan kota atau bangunan yang memiliki nilai sejarah, suatu peristiwa yang mencatat peran ikatan simbolis suatu rangkaian sejarah, dan babak perkembangan suatu kota.
  - Memperkuat kawasan, kehadiran suatu objek atau karya akan mempengaruhi kawasan-kawasan sekitarnya dan bermakna untuk meningkatkan mutu dan citra lingkungannya.
- c. Pontoh (1992) mengkategorikan objek yang akan dikonservasikan sebagai berikut:
- Nilai (*value*) dari objek, mencakup nilai estetik yang didasarkan pada kualitas bentuk maupun detailnya. Suatu objek yang unik dan karya yang mewakili gaya zaman tertentu, dapat digunakan sebagai contoh suatu objek konservasi.
  - Fungsi objek dalam lingkungan kota, berkaitan dengan kualitas lingkungan secara menyeluruh. Objek merupakan bagian dari kawasan bersejarah dan sangat berharga bagi kota. Objek juga merupakan tengeran (*landmark*) yang memperkuat karakter kota yang memiliki keterkaitan emosional dengan warga setempat.
  - Fungsi lingkungan dan budaya, penetapan kriteria konservasi tidak terlepas dari keunikan pola hidup suatu lingkungan sosial tertentu yang memiliki tradisi kuat. Suatu objek akan berkaitan erat dengan fase perkembangan wujud budaya tersebut.
- d. Attoe dalam Catanese & Snyder (1992) berpendapat, bahwa perbedaan kualitas dan tingkat pentingnya dalam menentukan objek pelestarian didasarkan pada lima pertimbangan sebagai berikut:
- Dianggap yang pertama; bangunan yang dianggap sebagai bangunan yang pertama dibangun.
  - Patut diperhatikan menurut sejarah; bangunan yang memiliki kaitan dengan peristiwa atau tokoh sejarah tertentu.
  - Perlu dicontoh; bangunan yang merupakan hasil karya besar dengan prestasi khusus untuk golongannya dan karena keistimewaannya ini perlu dicontoh.
  - Tipikal; bangunan yang melambangkan tradisi kebudayaan, yaitu mencerminkan keadaan sebenarnya, cara kehidupan dan cara melakukan sesuatu pada suatu tempat dan suatu waktu tertentu.

- Langka; bangunan yang unik dan langka dan merupakan warisan terakhir dari suatu tipe bangunan.
- e. Rypkema dalam Tiesdell (1992) merumuskan nilai dari upaya pelestarian, antara lain:
- Nilai estetika, bangunan tersebut secara intrinsik indah dan antik. Objek pelestarian tersebut memiliki keindahan yang mengagumkan, mewakili hasil karya pada periode tertentu yang tidak ditemukan lagi pada periode saat ini.
  - Keragaman arsitektural, keindahan kawasan bersejarah merupakan kombinasi dari beberapa bangunan dengan arsitektur yang beragam dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai gaya dan ekspresi.
  - Memiliki nilai bagi keragaman lingkungan, dalam skala yang lebih luas, keragaman arsitektural juga berkontribusi bagi keragaman lingkungan.
  - Keragaman fungsi, keragaman tipe atau ruang dari bangunan dengan beragam umurnya akan memperluas kemungkinan untuk disewakan dengan lingkup fungsi yang beragam.
  - Nilai sumber daya, bangunan tua/bersejarah lebih baik digunakan kembali daripada diganti. Nilainya merupakan investasi sumber daya.
  - Nilai kontinuitas budaya dan peninggalan bersejarah, merupakan bukti nyata dari masa lalu terhadap identitas budaya dan ingatan masa lalu tentang orang atau tempat, yang hidup pada tradisi tertentu dan memberikan arti pada masa sekarang dengan interpretasi masa lalu.
  - Nilai ekonomi dan komersial, bangunan bersejarah dianggap tidak memiliki kegunaan atau tidak ada nilai gunanya dalam pasar. Bangunan bersejarah harus memiliki nilai ekonomi yang lebih besar sebagai alternatif yang lebih baik. Dengan kata lain, biaya utilisasi bangunan bersejarah harus lebih rendah.

Kriteria-kriteria tersebut, dapat disimpulkan suatu tabel kriteria yang menggambarkan dasar-dasar pertimbangan mengapa suatu objek perlu dilestarikan (Tabel 2.3).

**Tabel 2.3 Kriteria Objek Pelestarian**

Kriteria	Dobby	Catanese	Pontoh	Attoe	Rypkema
Estetika	Nilai estetis dan arsitektonis yang tinggi dalam hal bentuk, struktur, tata ruang dan ornamennya	Nilai arsitektural (bentuk,gaya, struktur, tata kota) yang mewakili sejarah tertentu	Kualitas bentuk dan detail bangunan, unik	Bangunan yang unik	Indah, antik, mewakili periode tertentu

Lanjutan Tabel 2.3 Kriteria Objek Pelestarian

Kejamakan	Seberapa jauh karya arsitektur tersebut mewakili suatu ragam atau jenis khusus yang spesifik	Mewakili kelas dan jenis khusus	Mewakili gaya dan zaman tertentu	Dianggap sebagai bangunan yang pertama dibangun	
Kelangkaan	Bangunan yang hanya satu dari jenisnya atau merupakan contoh terakhir yang masih ada	Sisa warisan gaya tertentu yang mewakili suatu zaman yang tidak dimiliki daerah lain		Bangunan yang unik dan langka, merupakan warisan terakhir dari suatu tipe bangunan	
Keluar-biasaan	Bangunan-bangunan yang dilindungi karena memiliki keistimewaan misalnya yang terpanjang, tertinggi, terbesar, yang pertama dan lain sebagainya	Memiliki keistimewaan (bentuk menonjol, tertinggi, terbesar, dll) dan memberi tanda atau ciri kawasan	Mewakili makna simbolis, tidak terlepas dari keunikan pola hidup lingkungan sosial yang berkarakter kuat	Merupakan hasil karya besar yang patut dicontoh	
Peranan sejarah	Penting untuk dilestarikan sebagai ikatan simbolis antara peristiwa dahulu dan sekarang	Memiliki nilai sejarah dari suatu rangkaian sejarah dan perkembangan kota	Objek berkaitan dengan fase perkembangan wujud budaya di suatu lingkungan	Patut diperhatikan berkaitan dengan peristiwa atau tokoh sejarah tertentu	Bukti nyata dari masa lalu sebagai identitas budaya dan tradisi tertentu
Memperkuat kawasan	Kehadirannya sangat bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan sekitarnya.	Meningkatkan mutu dan citra lingkungan	Berkaitan dengan kualitas lingkungan merupakan bagian dari kawasan bersejarah dan berharga bagi kota. merupakan landmark yang memprkuat karakter kota		Kombinasi keragaman arsitektural dengan berbagai gaya dan ekspresi
Keragaman fungsi					Tipe dan bentuk ruang yang beragam sehingga dapat disewakan untuk lingkup fungsi yang beragam pula sebagai investasi yang dapat digunakan kembali daripada
Nilai sumber daya					





Nilai ekonomi  
dan komersial

diganti  
Bangunan  
bersejarah harus  
memiliki nilai  
ekonomis yang  
lebih besar  
sebagai alternatif  
yang lebih baik,  
yaitu dimana  
biaya utilisasi  
bangunan  
bersejarah harus  
lebih rendah

Sumber: Dobby dalam Erwin (2000), Catanese (1986), Pontoo (1992), Attoe dalam Catanese & Snyder (1992), Rypkema dalam Tiesdell (1992)

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan aspek pertimbangan yang menjadi dasar dari objek pelestarian diambil dari kumpulan kriteria terpilihnya suatu objek sebagai objek pelestarian. Dasar-dasar pertimbangan tersebut antara lain:

1. Dasar pertimbangan fisik-visual

Dasar pertimbangan fisik-visual ini terdiri dari:

- a. Estetika/arsitektonis, berkaitan dengan nilai estetis dan arsitektural, meliputi bentuk, gaya, struktur, tata ruang dan ornamen. Bangunan atau bagian dari kota mewakili prestasi khusus atau gaya-gaya sejarah tertentu.
- b. Kejamakan/ tipikal, berkaitan dengan objek yang mewakili kelas jenis khusus, tipikal yang cukup berperan. Tolak ukur kejamakan ditentukan pada bentuk suatu ragam atau jenis khusus yang spesifik.
- c. Kelangkaan, berkaitan dengan objek yang mewakili sisa dari warisan peninggalan terakhir dari gaya yang mewakili zamannya, yang tidak dimiliki daerah lain.
- d. Keluarbiasaan/ keistimewaan, suatu objek konservasi yang memiliki bentuk paling menonjol, tinggi, dan besar. Keistimewaan memberi tanda atau ciri suatu kawasan tertentu.
- e. Peranan sejarah (nilai historis), merupakan lingkungan kota atau bangunan yang memiliki nilai historis suatu peristiwa yang mencatat peran ikatan simbolis suatu rangkaian sejarah masa lalu dan perkembangan suatu kota untuk dilestarikan dan dikembangkan.
- f. Keaslian bentuk yang dimiliki suatu bangunan dapat bertahan dalam waktu tertentu, namun dengan tampilan yang sederhana daripada bangunan yang lain.

- g. Keterawatan yang dimiliki suatu bangunan baik bangunan baru atau bangunan lama, dapat juga diikuti terjadinya perubahan bentuk asli suatu bangunan.
- h. Penguat karakter kawasan, berkaitan dengan objek mempengaruhi kawasan-kawasan sekitar dan bermakna untuk meningkatkan kualitas dan citra lingkungan.

## 2. Aspek pertimbangan non fisik

Selain pertimbangan fisik, untuk menentukan dasar-dasar pertimbangan objek pelestarian juga terdapat aspek pertimbangan non fisik, yaitu sebagai berikut (Nurmala, 2003:78):

- a. Ekonomi, keberadaan bangunan tua/bersejarah dengan kondisi yang baik akan menjadi daya tarik bagi para wisatawan dan investor untuk mengembangkannya sehingga dapat digali potensi ekonominya.
- b. Sosial dan budaya, bangunan tua/bersejarah tersebut memiliki nilai agama dan spiritual, memiliki nilai budaya dan tradisi yang penting bagi masyarakat.

### C. Motivasi pelestarian

Budihardjo (1989) mengemukakan bahwa motivasi dari kegiatan pelestarian perlu dirumuskan secara tepat, mencakup:

- Mengembalikan wajah objek konservasi;
- Memanfaatkan objek pelestarian untuk menunjang kehidupan masa kini;
- Mengarahkan perkembangan masa kini yang diselaraskan dengan perencanaan masa lalu yang tercemin dalam objek pelestarian; dan
- Menampilkan sejarah pertumbuhan lingkungan kota dalam wujud fisik tiga dimensi.

Menurut Pontoh (1992), arahan konservasi suatu kawasan atau bangunan perlu memiliki motivasi, antara lain:

- Mempertahankan budaya atau sejarah kota
- Menjamin terwujudnya keragaman bangunan kota sebagai tuntutan aspek estetis serta keanekaan budaya masyarakat setempat
- Motivasi ekonomi yang menganggap nilai bangunan yang dilestarikan akan meningkat, sehingga bernilai komersial untuk modal bagi suatu lingkungan kota
- Motivasi simbolis yang merupakan manifestasi fisik dan identitas kelompok masyarakat tertentu yang pernah menjadi bagian dari sejarah pertumbuhan kota

### 2.3.4 Konsep pelestarian

Menurut Budihardjo (1993:122), konsep seperti “*adaptive use*” atau pemberian fungsi baru pada bangunan lama kiranya layak untuk dikembangkan. Bangunan kuno bersejarah dipertahankan bentuknya, gaya dan ragamnya secara fisik, tetapi ruang di dalamnya diolah untuk mewedahi tuntutan kebutuhan ruang yang berbeda dari kegunaannya. Kota sebagai jasad hidup memang pada saat tertentu mengelupaskan kulit dan bagian-bagian yang sudah tidak berfungsi lagi, namun kerangka atau struktur utama yang menjadi pendukung berfungsinya kota dan merupakan cerminan sejarah masyarakatnya harus tetap dipertahankan dan dihidupkan kembali seoptimal mungkin.

Kawasan kota lama yang menyandang peran sebagai tonggak sejarah tidak sepatasnya dibiarkan hancur, melainkan harus dihidupkan kembali dengan berbagai daya. Penekanan kegiatannya tidak terbatas pada pemulihan fungsi sesuai fungsi aslinya, tetapi bisa pula memberikan atau menyuntikan dengan fungsi baru yang lebih tanggap terhadap tuntutan perkembangan zaman, yang dilestarikan pun tidak mutlak harus keseluruhan, dapat saja hanya bagian-bagian tertentu yang dipertahankan, bahkan mungkin hanya menyisakan wajah depan atau *facade*-nya saja. Perlu disadari bahwa konservasi bangunan dan lingkungan kuno bersejarah itu lebih dari sekedar mempertahankan bentuk fisik bangunan dan lingkungannya, tetapi justru yang lebih penting semangat masa lampau yang terkandung di dalamnya. Warisan budaya harus dilihat sebagai aset integral suatu bangsa yang dapat berburan menciptakan kebanggaan. Latar sejarah secara fisik dan visual sepatutnya dijaga jangan sampai hilang atau terkubur bersama aktor-aktor pelakunya. “*Old historic buildings should never die, neither fade away*”, menurut kaum *conservationistis* (Budihardjo, 1993).

Konsep awal pelestarian adalah konservasi, yaitu pengawetan benda-benda monumen dan sejarah (lazim dikenal sebagai preservasi). Perkembangan lingkungan perkotaan yang memiliki nilai sejarah serta kelangkaan menjadi dasar bagi suatu tindakan konservasi. Dalam perencanaan suatu lingkungan kota, unit konservasi dapat berupa sub bagian wilayah kota bahkan keseluruhan kota sebagai sistem kehidupan yang memiliki ciri atau nilai khas. Hal pokok yang mendasari kajian penetapan rencana perlindungan dan pelestarian objek di suatu kawasan studi, adalah (Antariksa, *et al.* 2004):

1. Upaya pelestarian yang akan dilakukan perlu terlebih dahulu didasari oleh asumsi para pengamat memiliki kesamaan motivasi dan persepsi, bahwa kawasan studi benar-benar memiliki bangunan dan lingkungan bersejarah.

2. Upaya pelestarian bukan menuju ke arah tindakan proteksi, melainkan lebih kepada konsep simultan antara preservasi dan pengembangan yang terintergrasi.
3. Upaya pelestarian dijabarkan dalam konsep preservasi-konservasi. Dalam hal ini, dilakukan perlindungan bersejarah ke arah terpeliharanya kualitas fisik dan kesinambungan nilai sejarah, sosial, budaya dan ekonomi.
4. Upaya pelestarian lebih didasarkan pada masalah fisik, berupa konseptual dalam bentuk rekomendasi strategis bagi implementasi kebijakan terhadap pelestarian dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pelestarian.

### **2.3.5 Permasalahan pada pelestarian**

Dalam upaya penjabaran strategi pembangunan berwawasan identitas, salah satu aspek yang sering terlupakan adalah pelestarian bangunan kuno/bersejarah, yang banyak terdapat di segenap pelosok daerah. Perhatian terlalu banyak dicurahkan pada bangunan baru, yang memang lebih mengesankan sebagai cerminan modernitas. Padahal dengan hilangnya bangunan kuno tersebut, lenyap pulalah bagian dari sejarah suatu tempat yang sebenarnya telah menciptakan suatu identitas tersendiri, sehingga menimbulkan erosi identitas budaya (Sidharta & Budihardjo, 1989:3).

Sidhartha & Budihardjo (1989:3) juga mengungkapkan bahwa sebagaimana diketahui, kesinambungan masa lampau - masa kini - masa depan yang mengejewantah dalam karya-karya arsitektur setempat merupakan faktor kunci dalam penciptaan rasa harga diri, percaya diri dan jati diri atau identitas karena keberadaan bangunan kuno bersejarah tersebut mencerminkan kisah sejarah, tata cara hidup, budaya dan peradaban masyarakatnya. Oleh karena itu, pelestarian bangunan kuno/ bersejarah perlu untuk dilestarikan. Namun pada kenyataannya, kegiatan pelestarian sering mengalami benturan dengan kepentingan pembangunan, sehingga pelestarian dianggap sebagai penghalang pembangunan yang mengakibatkan timbulnya pertentangan-pertentangan dalam pelestarian.

Permasalahan yang berkaitan dengan pertentangan perlu atau tidaknya pelestarian dapat digolongkan sebagai permasalahan makro pelestarian. Permasalahan makro yang dihadapi dalam melakukan kegiatan pelestarian bangunan dapat dibedakan atas aspek ekonomi, sosial dan fisik (lihat Tabel 2.4)

**Tabel 2.4 Permasalahan Makro Pelestarian**

Aspek	Permasalahan
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelestarian dianggap menghambat mekanisme ekonomi pasar bebas sejak diadakan sistem legalisasi.</li> <li>▪ Desain bangunan yang dilestarikan dianggap tidak efisien dan penggunaannya kurang ekonomis menjadi penghalang pembangunan gedung dan fasilitas yang lebih baik.</li> <li>▪ Dipandang sebagai usaha pencegahan atas perbaikan lingkungan 'kelompok lemah' karena adanya halangan untuk membangun gedung dan fasilitas yang baru, pelestarian dianggap menyebabkan rakyat biasa harus melanjutkan tinggal dan bekerja dalam kondisi yang kurang.</li> </ul>
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hakikat pembangunan yang berhasil membawa perubahan pada pola pikir dan pandangan masyarakat sehingga dalam mengambil keputusan lebih menitikberatkan pada kepentingan efisiensi yang bertujuan mendaatkan keuntungan ekonomis yang sebesar-besarnya.</li> <li>▪ Usaha yang dilakukan para perencana maupun kelompok konservasi dalam mempertahankan bentuk fisik pada kawasan dianggap mengabaikan permintaan terhadap fasilitas perbelanjaan karena fasilitas perbelanjaan memerlukan area horizontal yang luas untuk ruang jual, ruang pameran dan parkir, sedangkan kawasan yang bernilai sejarah cenderung menyediakan unit-unit untuk pedagang eceran yang membutuhkan ruang sempit dalam bangunan vertikal.</li> </ul>
Fisik	

Sumber : Gufron (1994:20-21); Yuwono (1996:2-3)

Selain permasalahan pelestarian yang bersifat makro, di dalam penerapannya pelestarian juga menghadapi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan pelestarian yang berkaitan dengan sistem pengelolaan warisan budaya, dengan perangkat terkait sebagai berikut : aspek legal, sistem administrasi, piranti perencanaan, kuantitas dan kualitas tenaga pengelola, serta pendanaan (Catanese & Snyder, 1992:429). Permasalahan mikro yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pelestarian dapat dilihat pada Tabel 2.5:

**Tabel 2.5 Permasalahan Mikro Pelestarian**

Aspek	Permasalahan
Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak-hak dan tanggung jawab apa yang dimiliki oleh anggota masyarakat dalam pelestarian bangunan ?</li> <li>▪ Seberapa jauhkah seharusnya pembatasan-pembatasan atas perubahan dalam bangunan-bangunan yang dilestarikan ?</li> <li>▪ Dapatkah pemerintah memaksa pemilik untuk melestarikan dan memelihara bangunan yang dilestarikan ?</li> <li>▪ Hak-hak apa yang dimiliki oleh pemilik dan penyewa dalam kaitannya dengan tanah ?</li> <li>▪ Siapakah yang berhak memperoleh keuntungan dan kerugiannya ?</li> </ul>
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siapakah yang membiayai konservasi dan siapa yang memperoleh keuntungannya ?</li> </ul>
Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Siapakah yang berhak dan harus memutuskan apa yang dilestarikan, untuk berapa lama dan sejauh mana ?</li> </ul>

Sumber : Catanese & Snyder (1992:429)

Selanjutnya menurut Fuady (1999:36), bahwa keragaman budaya menuntut karya arsitektur harus dirancang semakin serius agar kawasan terhindar polusi visual

yang kacau, untuk itu rancangan arsitektur yang kontekstual akan memberikan kemungkinan tampilan kawasan yang lebih harmonis secara visual, baik melalui rancang bangunan maupun rancang perkotaan. Kontinuitas visual kawasan dapat dijaga dengan memperhatikan elemen tampilan seperti bentuk dasar lama namun tampak berbeda, pemakaian bahan, warna, tekstur, serta ornamentasi bangunan.

Menurut Antariksa (2005), di dalam masalah konservasi bangunan maupun kawasan, masih banyak yang belum memperhatikan beberapa faktor yang saling terkait dengan masalah konservasi, adalah teori konservasi, peraturan pemerintah daerah, peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya, dan pembelajaran dari beberapa kasus yang terdapat dinegara lain. Pada tingkat kebijakan (politik), selalu terdapat konflik terbuka yang objektif terhadap kepentingan pusat dan daerah. Seorang penentu kebijakan mungkin melihat tempat kuno-bersejarah sebagai masalah dalam mengembangkan pusat kotanya. Di samping itu, kepentingan pusat (nasional) mengakui bahwa bangunan kuno-bersejarah maupun kawasan bersejarah sebagai salah satu contoh warisan budaya (cultural heritage) yang perlu untuk dipertahankan. Demikian juga bagi pemilik bangunan kuno-bersejarah, tidak pernah memahami bahwa bangunannya itu dapat memberikan asset.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menangani, masalah konservasi di antaranya adalah (Antariksa 2005):

1. Teori konservasi, Banyak teori-teori konservasi yang dihasilkan dari berbagai bentuk pertemuan ilmiah di berbagai negara, baik dalam konsep maupun teknis pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat diadaptasi dan dikembangkan dengan baik.
2. Peraturan pemerintah daerah setempat, masih banyak peraturan-peraturan yang belum banyak dipublikasikan, terutama yang berkaitan dengan konservasi bangunan kuno-bersejarah dengan terpaksa dirobohkan atau dihancurkan untuk kemudian diganti dengan bangunan-bangunan baru.
3. Peraturan perundangan benda cagar budaya. Masih terlihat tumpang tindih dalam melindungi masing-masing bangunan kuno maupun kawasan untuk setiap daerah, baik mengenai usia bangunan, style, ornamen, bahan, dan sebagainya.

Menurut Antariksa (2005), kiranya perlu dipahami dan diikuti, bahwa perkembangan peraturan konservasi sudah beranjak dari sekitar konservasi bangunan, benda-benda bersejarah atau kawasan saja. Akan tetapi, mencakup suatu kawasan kota, dan juga dikembangkan dengan lebih luas lagi melalui "*intangible cultural properties*".

Seperti, konservasi seni kerajinan (tenun, keramik, perak, dan sebagainya), yang mempunyai nilai seni dan sejarah yang tinggi. Prinsip kerjasama pemerintah setempat, pengelola cagar budaya, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, pemerhati konservasi serta pengusaha, dapat dijadikan sebagai jaminan jalan keluar bahwa arsitektur dan perkotaan bersejarah merupakan ekspresi jati diri bangsa.

### 2.3.6 Pengendalian dan perlindungan pelestarian kawasan

Menurut Antariksa *et al* (2004), untuk mencegah persoalan-persoalan lain yang muncul secara kontradiktif terhadap upaya-upaya pelestarian suatu kawasan, perlu adanya peraturan dan perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan penerapan hukum dan peraturan, perlindungan serta pengendalian lingkungan bangunan bersejarah yang perlu untuk dilestarikan. Ada tiga hal utama yang perlu dikembangkan dalam pelestarian suatu kawasan, yaitu antara lain (Pontoh, 1992:39 dalam Antariksa *et al*, 2004):

1. Petunjuk operasional yang jelas, menyangkut jenis dan cara perlindungan kawasan dan lingkungan bangunan yang akan dijadikan objek pelestarian.
2. Sanksi hukum yang jelas dan tegas terhadap pelanggaran serta pemberian insentif bagi pelaku pelestarian (konservasi).
3. Subsidi bagi badan atau perorangan yang berniat melakukan pemugaran, konservasi maupun preservasi.

Menurut Erwin (2000), untuk dapat menjalankan program pelaksanaan konservasi diperlukan perangkat legal formal sebagai landasan dasar agar masing-masing instansi bisa jelas dalam menjalankan tugasnya. Aturan dasar hukum itu akan mencakup hal mendasar yang berkaitan dengan tindakan konservasi dan kawasan konservasinya sebagai fokus pekerjaan, mekanisme pengaturan akan berkaitan dengan bagaimana upaya pengaturan tersebut akan diberlakukan. Hal yang perlu dikembangkan adalah (Erwin, 2000):

- Perijinan mendirikan, memperbaiki dan merubah bangunan dan lingkungan agar sesuai dengan kehendak konservasi;
- Pembinaan iklim konservasi melalui perancangan umum, pemberian motivasi kepada masyarakat;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan konservasi; dan
- Pengawasan pembangunan, agar semua bentuk rencana konservasi dapat di atasi dan dilaksanakan secara benar.

### 2.3.7 Penentuan variabel pelestarian

Menentukan suatu objek variabel pelestarian tersebut layak atau tidak untuk dilestarikan dapat diukur dengan kriteria-kriteria tertentu, yaitu kriteria estetika, kejamakan, kelangkaan, keluarbiasaan, peranan sejarah, keaslian bangunan, keterawatan, dan memperkuat citra kawasan. Pengukuran kriteria-kriteria tersebut diwujudkan dalam bentuk penilaian terhadap suatu variabel-variabel tertentu yang terkait secara langsung dan merupakan interpretasi penting dari kriteria-kriteria tersebut.

Variabel-variabel tersebut antara lain (Nurmala, 2003:78):

a. Bentuk bangunan

Bentuk dalam suatu bangunan menyangkut fasade (perwajahan) bangunan. Wajah bangunan dapat memberikan nuansa pada nilai arsitektural. Selain itu dari perwajahan ini dapat menciptakan ragam bangunan. Dari bentuk perwajahan bangunan dapat diinformasikan ragam bangunan pada jaman yang diwakilinya dan juga identitas pada suatu kawasan. Wajah bangunan secara umum dapat mewakili kriteria-kriteria estetika, kejamakan, keluarbiasaan, kelangkaan serta dapat memperkuat ciri khas kawasan. Penilaian terhadap wajah bangunan didasarkan pada tipe bangunan rumah kampung, tipe-tipe tersebut antara lain tipe polos, tipe langkan, dan tipe teras.

b. Gaya bangunan

Secara umum gaya bangunan mempengaruhi nilai estetika, kelangkaan, kejamakan serta keluarbiasaan, dan gaya bangunan tersebut memberikan kekuatan pada ciri khas suatu kawasan. Gaya bangunan berkaitan dengan bentuk arsitektur bangunan yang ada. Langgam (gaya bangunan) tersebut antara lain tipe Jawa, tipe Kolonial, tipe Jengki (1950-an), dan tipe Campuran. Penilaian gaya bangunan didasarkan pada kondisi yang masih ada saat ini, yaitu berdasarkan penggunaan salah satu langgam arsitektur yang telah disebutkan, serta keaslian dari penggunaan langgam arsitektur tersebut dan fungsi dari bangunan yang masih dipertahankan akan mempunyai nilai yang tinggi terhadap bangunan tersebut.

c. Struktur bangunan

Struktur pada suatu bangunan adalah bahan/material yang ada dalam bangunan tersebut. Ukuran keaslian bangunan juga dapat diukur dari penggunaan material pada bangunan, material bangunan yang dapat dipertahankan akan menambah nilai keaslian suatu bangunan.



- d. Usia bangunan  
Usia bangunan merupakan salah satu cara untuk mengetahui sejarah suatu bangunan dalam perkembangan kota. Selain itu dapat pula memberi petunjuk terhadap penilaian tingkat kelangkaan bangunan karena terkait dengan zaman yang diwakilinya. Penilaian terhadap usia bangunan mengacu pada Undang-undang Cagar Budaya No. 5 tahun 1992 pasal 1 ayat1, selain itu juga melihat pada konteks sejarah bangunan yang ada.
- e. Fasade bangunan  
Fasade bangunan merupakan bagian yang dapat memperlihatkan ekspresi dari suatu bangunan.
- f. Fungsi bangunan  
Fungsi merupakan kegiatan yang ditampung dalam bangunan tersebut.
- g. Skala dan proporsi bangunan  
Skala bangunan merupakan perbandingan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, sedangkan proporsi adalah perbandingan elemen yang terdapat dalam satu bangunan. Unsur-unsur dalam skala ini adalah panjang, lebar, dan tinggi.
- h. Ornamen  
Ornamen merupakan pola-pola yang digunakan sebagai elemen estetis bangunan, biasanya bermotif geometris, flora, fauna, dan lain-lain, tergantung dari gaya arsitektur yang digunakan pada suatu bangunan.
- i. Warna  
Warna memberikan ekspresi tersendiri bagi bangunan dan dapat mencerminkan fungsi di dalamnya.
- j. Interior  
Interior merupakan penataan ruang dalam bangunan yang disesuaikan dengan fungsi kegiatan yang ditampung oleh suatu bangunan.
- k. Meterial bangunan  
Merupakan bahan yang digunakan dalam pekerjaan struktur dan konstruksi bangunan serta pelapis bangunan, misalnya kayu, beton, besi, dan lain-lain.

## 2.4 Studi Penelitian Terdahulu

### 2.4.1 Studi terdahulu tentang pelestarian

Beberapa studi terkait dengan pelestarian dari sudut pandang keilmuan yang sama (Arsitektur/ Perencanaan Wilayah) dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Agus Purnama (2006)

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Purnama dalam penelitian yang berjudul “Pelestarian Kawasan Istana Kesultanan Di Kota Bima” membahas mengenai identitas dan karakteristik hingga ke pelestarian Istana Kesultanan Bima, yang berupa warisan budaya masa lalu masyarakat Bima (Lombok) yang masih eksis hingga hari ini. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif eksploratif dan pendekatan diakronik. Hasil dari penelitian ini berupa arahan, yaitu:

- a. Konsep arahan pelestarian, perlu dilakukan upaya antisipasi secepatnya, melalui perlindungan hukum, pemberdayaan masyarakat, penataan sosial budaya, serta penataan fisik kawasan, namun tetap mempertahankan karakter khas kawasan sebagai lingkungan bekas pusat pemerintahan Kesultanan Bima. Penciptaan suasana tradisional dapat dicapai, antara lain dengan menelusuri sejarah dan karakteristik kawasan dapat dijadikan acuan dalam penentuan arahan pelestarian.
- b. Arahan pelestarian kawasan, dilakukan dengan dua metode pendekatan pelestarian, yakni preservasi dan adaptasi/ revitalisasi
- c. Arahan pelestarian bangunan kuno-bersejarah, dilakukan dengan empat metode pendekatan yang digunakan, yakni dengan preservasi, konservasi, adaptasi/ revitalisasi dan rehabilitasi; dan
- d. Arahan pengembangan potensi citra kawasan, dilakukan dengan memadukan aktivitas dan fungsi-fungsi yang ada supaya saling mendukung dan tidak saling mengganggu, dengan optimalisasi citra kawasan melalui penguatan karakter lokal.

Perbedaan antara penelitian saat ini yang berjudul “Pelestarian Istana Taman Air Soekasada Kabupaten Karangasem Propinsi Bali” dengan penelitian yang dihasilkan Purnama (2006), ada pada metode penelitian yang menggunakan pendekatan diakronik. Purnama (2004) menggunakan berbagai tahapan kegiatan pada setiap analisis untuk mempermudah pencapaian tujuan penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Purnama (2004) memberikan manfaat bagi peneliti saat ini khususnya di dalam mendapatkan referensi tentang sampel dengan metode *gethok-tular*.

## 2. Rini Krisna (2005)

Studi penelitian yang dilakukan oleh Rini Krisna (2005) berjudul "Studi Pelestarian Kawasan Wisata Budaya di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah", membahas mengenai karakteristik wisata budaya, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelestarian, serta arahan pelestarian pada kawasan wisata budaya di Dusun Sade. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dan eksploratif. Hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Karakteristik kawasan wisata budaya di Dusun Sade banyak dipengaruhi oleh kepercayaan yang pernah berkembang di Pulau Lombok, yaitu Islam Waktu Telu.
- b. Berkembangnya kawasan wisata Dusun Sade yang dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan budaya, maka pola permukiman dan bangunan di Dusun Sade juga mengalami perubahan dan pergeseran.
- c. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelestarian pada kawasan wisata budaya di Dusun Sade dapat dibedakan menjadi dua, yaitu permasalahan makro dan mikro. Permasalahan makro berkaitan dengan adanya sebagian masyarakat yang tidak setuju dengan upaya pelestarian yang ada karena dianggap tidak menguntungkan secara ekonomi serta membatasi hak mereka untuk mengubah bangunan tradisionalnya sesuai dengan kebutuhan dan selera. Permasalahan mikro berkaitan dengan pelaksanaan pelestarian yang meliputi belum adanya penetapan batas-batas pelestarian yang berkekuatan hukum, belum adanya badan khusus pelestarian dan alokasi dana khusus untuk pemugaran bangunan tradisional, serta belum adanya pedoman desain, perda tentang pengendalian aktivitas kawasan tingkat perubahan fisik yang tersedia serta belum adanya koordinasi antar instansi terkait.

- d. Arahan pelestarian fisik dan non fisik

Arahan pelestarian fisik untuk Dusun Sade lebih kepada upaya-upaya untuk mempertahankan hal-hal yang berkaitan dengan pola permukiman dan bangunannya, seperti deretan rumah berbentuk linier yang menghadap kejalan di dalam permukiman, orientasi rumah ke arah timur dan barat, pendirian bangunan-bangunan baru yang disesuaikan dengan tahapan sistematis berdasarkan kemampuan ekonomi, pembangunan *beruga* yang berada di depan rumah pemilik, penggunaan bahan-bahan yang berasal dari alam untuk material rumah; serta mempertahankan tata ruang dalam khususnya untuk Bale Tani.

Selain itu juga diperlukan tindakan pelestarian yang berupa restorasi/pemugaran, rehabilitasi, dan replikasi.

Arahan non fisik untuk Dusun Sade yang bertujuan meningkatkan kualitas fisik lingkungan dan nilai ekonomi kawasan budaya Dusun Sade dan lingkungan sekitarnya meliputi: pengkoordinasian kegiatan ritual budaya dengan kegiatan wisata lain pada kesempatan tertentu, misalnya dengan mengadakan pertunjukan budaya bertepatan dengan acara Bau Nyale di kawasan pantai Kuta yang diadakan setiap bulan Februari; pemeliharaan dan pengembangan kegiatan budaya, seperti kegiatan menanam seni musik, menulis lontar dan seni tari; serta pembentukan wadah kelestarian budaya sasak yang menampung aspirasi seniman dan budayawan yang ada di Dusun Sade dan dusun di sekitarnya.

Perbedaan antara penelitian saat ini yang berjudul “Pelestarian Istana Taman Air Soekasada Kabupaten Karangasem Propinsi Bali” dengan penelitian yang dihasilkan Krisna (2005), secara umum hanya pada objek studinya yang berupa sebuah desa adat dengan wilayah studi di propinsi Nusa Tenggara Barat. Penelitian Krisna (2005) cukup memberikan manfaat bagi penelitian saat ini sebagai referensi penelitian yang membahas tentang tema pelestarian.

### **3. Yusni Ali Artha (2005)**

Studi penelitian oleh Artha (2005) berjudul “Studi Pelestarian Bangunan Kuno di Kawasan Kampung Peneleh Surabaya”, membahas mengenai karakteristik kawasan kampung kuno dan bangunan kuno yang ada di dalamnya, serta berusaha mencari arahan pelestarian terhadap dua elemen tersebut di atas. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif untuk mengidentifikasi karakteristik kawasan studi dan mengidentifikasi karakteristik bangunan di kawasan studi, kemudian menentukan tindakan pelestarian dengan menggunakan skala penilaian deskriptif/skorning (berdasarkan kriteria-kriteria pelestarian) terhadap bangunan-bangunan kuno tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah:

- a. Pada pola penggunaan lahan yang ada di Kampung Peneleh didominasi dengan perumahan, sedangkan jasa dan komersil mendominasi di luar kampung atau di Jalan Peneleh.
- b. Berdasarkan kajian mengenai tingkat kepentingan pelestarian berdasarkan penilaian kriteria-kriteria pelestarian yang telah dilakukan dengan menggunakan skoring, maka diketahui dari 86 bangunan yang diteliti terdapat 11 bangunan yang memiliki tingkat kepentingan pelestarian tinggi, 65 bangunan

yang memiliki tingkat pelestarian sedang dan 10 bangunan yang termasuk dalam kategori tingkat kepentingan pelestarian rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Artha (2005) ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan karena di dalam penelitian Artha (2005) mengambil suatu kasus pada sebuah perkampungan dengan fokus pembahasan pada setiap bangunan kuno yang ada disana sebagai objek utamanya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan saat ini mengambil suatu kasus yang berupa kawasan kompleks situs kuno dengan penekanan pelestarian pada tata ruang kawasan situs tersebut. Penelitian Artha (2005) cukup memberikan manfaat bagi penelitian saat ini sebagai referensi penelitian yang membahas tentang tema pelestarian.

#### **4. Nurul Sri Hardiyanti (2005)**

Studi penelitian oleh Hardiyanti (2005) yang berjudul "Studi Pelestarian Kawasan Keraton Kasunan Surakarta", berusaha untuk mengidentifikasi perkembangan kawasan Keraton Kasunan Surakarta dalam tenggang periode tertentu dan mencari faktor-faktor yang menghambat kegiatan pelestarian di kawasan itu, kemudian mencari arahan pelestarian yang sesuai dengan permasalahan yang ditemukan. Ditinjau dari metode penelitiannya, studi ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode sinkronik – diakronik dan metode evaluatif. Metode sinkronik diakronik digunakan pada pembahasan tentang perkembangan kawasan dari tahun 1745 – 2004. Metode evaluatif digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala dilaksanakannya kegiatan pelestarian kawasan, serta digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menentukan arahan pelestarian kawasan Keraton Kasunan Surakarta. Hasil dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkembangan kawasan Keraton Kasunan Surakarta dari tahun 1745 – 2004 dapat diidentifikasi melalui metode sinkronik diakronik dengan penggunaan lima variabel, yaitu variabel elemen fisik; variabel politik, variabel ekonomi, variabel sosial dan variabel budaya.
- b. Faktor-faktor yang menjadi kendala dilaksanakannya kegiatan pelestarian dapat diidentifikasi, yaitu:
  - Berdasarkan faktor fisik; Adanya lokasi-lokasi atau lingkungan-lingkungan dalam kawasan yang mengalami perubahan fisik karena perubahan yang ada sekarang telah menghilangkan kekhasan daerah tersebut.

- Berdasarkan faktor politik, yakni karena masih adanya persepsi masyarakat yang bersifat negatif (tidak mendukung) karena dapat menghambat kelangsungan pelaksanaan politis tentang kebijakan pelestarian di keraton.
  - Berdasarkan faktor ekonomi, yakni lokasi kawasan Keraton Kasunan Surakarta berada di lokasi yang strategis untuk pengembangan kegiatan ekonomi, yang jika tidak dikendalikan maka kepentingan ekonomi di kawasan tersebut akan lebih besar bila dibandingkan dengan kepentingan pelestarian.
  - Berdasarkan faktor sosial, yakni adanya perubahan sosial di dalam masyarakat terkait dengan pengindahan terhadap aturan atau hukum adat yang berlaku di kawasan tersebut. Masyarakat tidak lagi merasa harus mematuhi aturan tersebut, dikarenakan tidak adanya sanksi jika tidak melakukannya.
- c. Arahan pelestarian ditentukan berdasarkan potensi dan permasalahan (kendala) pada kegiatan pelestarian. Kesimpulannya, yaitu 1) Bangunan-bangunan dengan identifikasi utama tidak diperbolehkan untuk dialih fungsi, kondisi arsitekturnya tetap dan harus selalu dirawat; 2) Untuk beberapa kawasan seperti *Alun-alun Lor* dan *Kidul*, kemudian kompleks *Paseban Lor* dan *Kidul* masih diperbolehkan untuk dialih fungsi (kecuali pada bangunan bersejarah) untuk menunjang kebutuhan ekonomi kawasan.

Perbedaan antara penelitian saat ini yang berjudul “Pelestarian Istana Taman Air Soekasada Kabupaten Karangasem Propinsi Bali” dengan penelitian yang dihasilkan Hardiyanti (2005), terletak pada metode penelitiannya yang memakai pendekatan sinkronik-diakronik di dalam pembahasannya, dikarenakan memang pada objek penelitian Hardiyanti (2005) memiliki rentang umur kekunoan yang telah berlangsung lebih dari 250 tahun. Namun penelitian yang dilakukan Hardiyanti (2005) sangat membantu peneliti di dalam menemukan berbagai referensi mengenai pelestarian kawasan istana.

##### 5. Faizan Dalilla (2006)

Studi penelitian Dalilla yang berjudul “Pelestarian Kawasan Bersejarah Kota Lama Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau” ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis karakteristik fisik yang dimiliki oleh kawasan bersejarah Kota Lama Siak yang terdiri dari penggunaan lahan, masa bangunan dan sirkulasi serta berusaha

untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi kawasan dalam kaitannya dengan kegiatan pelestarian untuk kemudian memberikan arahan-arahan yang dibutuhkan. Metode yang digunakan dalam studi pelestarian ini adalah metode deskriptif untuk mengetahui karakteristik fisik kawasan bersejarah Kota Lama Siak yang terdiri dari penggunaan lahan, masa bangunan dan sirkulasi; analisis pembobotan dengan metode skoring untuk mengetahui bangunan tua yang potensial dilestarikan berdasarkan kriteria makna kultural. Untuk menjawab pertanyaan rumusan yang kedua yaitu untuk mengetahui kinerja pelestarian yang sedang atau telah dilaksanakan sebelumnya di kawasan Kota Lama Siak, digunakan metode deskriptif dengan penentuan berdasarkan lima kriteria yang telah ditetapkan yaitu kesadaran dan inisiatif, dasar hukum, konsep dan rencana, organisasi serta aspek pendanaan. Untuk menentukan arahan pelestarian fisik di kawasan bersejarah Kota Lama Siak digunakan metode development dengan rencana arahan berupa tiga ragam pelestarian, yaitu preservasi, konservasi, dan rehabilitasi/ demolisi.

Hasil dari penelitian ini, yaitu berupa arahan kebijakan untuk kawasan dengan mempertimbangkan lokasi penyebaran bangunan dan tingkat perubahan bangunan dan lingkungannya diusulkan untuk diadakan pembagian zona lingkungan kuno untuk mempermudah penangannan. Sementara itu hasil dari evaluasi terhadap kinerja pelestarian yaitu ditemukan kelemahan yang meliputi:

- Kesadaran masyarakat yang kurang terhadap pentingnya upaya pelestarian terhadap kawasan Kota Lama Siak yang dibuktikan dengan tidak adanya upaya yang terorganisir dari masyarakat/ LSM terkait hal ini.
- Ketiadaan dasar hukum yang detail agar tidak membuat kerusakan di kawasan Kota Lama Siak menjadi semakin parah.
- Bentuk perencanaan pelestarian yang ada masih mengambang dan tidak ada penjelasan teknis yang jelas untuk hal tersebut.
- Belum adanya unit khusus di dalam instansi pemerintahan yang dibuat untuk mendukung upaya pelestarian bagi kawasan Kota Lama Siak.

Perbedaan antara penelitian saat ini yang dengan penelitian yang dilakukan Dalilla (2006) terletak pada objek penelitiannya, dengan kawasan Kota Lama Siak yang diteliti adalah bangunan-bangunan kuno dengan menggunakan metode pembobotan. Penelitian Dalilla (2006) cukup memberikan manfaat bagi penelitian saat ini sebagai referensi penelitian yang membahas tentang tema pelestarian.

#### 6. Agus Budi Setyawan (2005)

Penelitian dari Setyawan (2005) berjudul “Studi Pelestarian Kawasan Masjid Menara Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah”, memiliki sedikit kemiripan dengan studi yang dilakukan saat ini. Dari latar belakang objek penelitian yang berada di dalam kawasan penelitian, tidak semuanya merupakan cagar budaya, namun hanya masjid dan bangunan sekitarnya saja yang merupakan bangunan kuno, sementara sisa bangunan lainnya sudah tergolong bukan cagar budaya. Penelitian Setyawan (2005) memiliki fokus pembahasan pada karakteristik bangunan di kawasan Masjid Menara Kudus, dan mencari penyebab kerusakan dan perubahan yang terjadi pada kawasan itu, untuk kemudian menentukan bagaimana arahan pelestarian yang sesuai dengan karakteristik kawasan itu. Metode penelitian yang digunakan di dalam studi ini adalah metode penelitian deskriptif fenomologis. Pada tahap identifikasi karakteristik kawasan, dilakukan analisis terhadap sejarah perkembangan kota, elemen citra, sosial budaya, karakteristik dan potensi wisata. Pada tahap evaluasi dilakukan analisa dengan metode *cross tab* dan korelasi antara kerusakan dan perubahan bangunan dengan faktor-faktor fisik penyebabnya. Hasil dari penelitian ini berupa strategi pelestarian yang dibagi menjadi tiga kelompok implementasi yang diusulkan pada kawasan studi adalah preservasi, konservasi, adaptasi/revitalisasi, rehabilitasi dan demolisi. Arahan pengembangan yang ditetapkan untuk kawasan Masjid Menara Kudus antara lain, yaitu memperkuat identitas kawasan, pengendalian bangunan dan lingkungan kuno melalui Legal Protection dan penalties, meningkatkan motivasi pelestarian melalui insentif, menghidupkan aktivitas kawasan dengan melestarikan kesenian, budaya/ tradisi di masyarakat, serta mendorong bangunan lama untuk mampu mengadaptasi fungsi baru.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Setyawan (2006) dengan penelitian saat ini terletak pada tempat objek studinya, dan metode analisis untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Setyawan (2006) menggunakan metode deskriptif fenomologis, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode deskriptif eksploratif. Penelitian saat ini juga tidak bisa menerapkan metode *cross tab* dan korelasi sebagaimana pada penelitian Setyawan (2006) karena untuk menemukan permasalahan tentang kerusakan di Situs Istana Taman Ujung dapat menggunakan analisis dengan pendekatan deskriptif eksploratif..



### 7. Erwin Ibrahim (2006)

Studi penelitian oleh Hardiyanti (2006) yang berjudul "Studi Pelestarian Kawasan Keraton Kasepuhan Cirebon", berusaha untuk mengidentifikasi perkembangan kawasan Keraton Kasepuhan Cirebon dari awal berdirinya pada tahun 1529 hingga tahun 2004, dilanjutkan dengan usaha menemukan faktor-faktor yang menjadi kendala dilaksanakannya kegiatan pelestarian di kawasan itu, agar dapat ditemukan arahan pelestarian yang sesuai. Studi ini menggunakan metode analisis diakronik kawasan, analisis sinkronik kawasan, metode analisis penentuan faktor, analisis kendala kegiatan pelestarian, dan analisis penentuan arahan kegiatan pelestarian kawasan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



**Tabel 2.6 Tinjauan Studi Terdahulu Tentang Pelestarian**

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Lokasi	Rumusan Masalah	Metode	Perbedaan dengan Studi Saat ini
1.	Agus Purnomo	Pelestarian Kawasan Istana Kesultanan Di Kota Bima	2006	Kawasan pusat Kota Bima (Nusa Tenggara Barat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah karakteristik kawasan Istana Kesultanan Bima?</li> <li>2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan pada kawasan Istana Kesultanan Bima?</li> <li>3. Bagaimanakah arahan pelestarian yang sesuai untuk kawasan Istana Kesultanan Bima?</li> </ol>	Metode deskripsi eksploratif dengan pendekatan diakronik	Perbedaan dengan studi pelestarian Istana Taman Air Soekasada ada pada metode penelitian dan analisis yang digunakan. Penelitian dari Purnama menggunakan pendekatan diakronik dengan melalui tahapan kegiatan yang disusun untuk menjawab rumusan masalah pertama. Pada metode analisisnya, Purnama menggunakan analisis faktor untuk menjawab rumusan masalah yang kedua.
2	Rini Krisna	Studi Pelestarian Kawasan Wisata Budaya di Dusun Sade Kabupaten Lombok Tengah	2005	Dusun Sade (Nusa Tenggara Barat)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah karakteristik kawasan wisata budaya di Dusun Sade?</li> <li>2. Permasalahan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pelestarian pada kawasan wisata budaya di Dusun Sade?</li> <li>3. Bagaimanakah arahan pelestarian pada kawasan wisata budaya di Dusun Sade?</li> </ol>	Metode deskripsi eksploratif	Secara umum perbedaan dengan studi pelestarian Istana Taman Air Soekasada hanya pada wilayah studi, dikarenakan Krisna juga memiliki fokus pelestarian pada kawasan tidak hanya dari segi bangunan namun juga dari wisata budayanya, arahan pelestarian, dan lain sebagainya.
3.	Yusni Ali Artha	Studi Pelestarian Bangunan Kuno di Kawasan Kampung Peneleh Surabaya	2005	Kampung Peneleh Surabaya (Jawa Timur)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakteristik kawasan Kampung Kuno Peneleh?</li> <li>2. Bagaimana karakteristik bangunan kuno yang ada di Kampung Peneleh?</li> </ol>	Metode deskriptif dengan menggunakan penilaian berdasarkan skoring terhadap bangunan	Perbedaan dengan studi pelestarian Istana Taman Air Soekasada, yaitu pada objek studi yang lebih terfokus pada pelestarian bangunan (rumah) kuno

Lanjutan Tabel 2.6 Tinjauan Studi Terdahulu Tentang Pelestarian

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Lokasi	Rumusan Masalah	Metode	Perbedaan dengan Studi Saat ini
4	Nurul Sri Hardiyanti	Studi Pelestarian Kawasan Keraton Kasunan Surakarta	2005	Kawasan Keraton Kasunan Surakarta (Jawa Tengah)	<p>3. Bagaimana tindakan pelestarian bangunan kuno di kawasan Kampung Peneleh?</p> <p>1. Bagaimanakah perkembangan kawasan Keraton Kasunan Surakarta dari tahun 1745-tahun 2004?</p> <p>2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dilaksanakannya kegiatan pelestarian di kawasan Keraton Kasunan Surakarta?</p> <p>3. Bagaimanakah arahan pelestarian yang sesuai untuk kawasan Keraton Kasunan Surakarta?</p>	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sinkronik – diakronik dan metode evaluatif.	Perbedaan dengan studi pelestarian Istana Taman Air Soekasada, yaitu pada metode penelitiannya. Hardiyanti menggunakan analisa sinkronik dan diakronik untuk mengidentifikasi karakteristik objek studi. Hardiyanti juga menggunakan analisis yang berbeda, yaitu analisis faktor untuk mengidentifikasi permasalahan pelestarian pada objek studi.
5	Faizan Dalilla	Pelestarian Kawasan Bersejarah Kota Lama Siak Kabupaten Siak Propinsi Riau	2006	Kawasan Kota Lama Siak (Riau)	<p>1. Bagaimanakah karakteristik fisik kawasan Kota Lama Siak sebagai kawasan bersejarah?</p> <p>2. Bagaimana kinerja kegiatan pelestarian yang dilaksanakan di kawasan bersejarah Kota Lama Siak?</p> <p>3. Bagaimana arahan pelestarian bagi kawasan bersejarah Kota Lama Siak?</p>	Metode deskriptif, evaluatif dan <i>development</i> melalui penetapan kriteria berdasarkan masing-masing kebutuhan analisisnya.	Perbedaan dengan penelitian Istana Taman Air Soekasada terletak pada objek penelitiannya, dengan kawasan Kota Lama Siak yang diteliti adalah bangunan-bangunan kuno (menggunakan metode pembobotan) sementara penelitian saat ini memiliki fokus pada objek berupa kompleks situs kuno (tanpa pembobotan) beserta kawasan pendukungnya.
6	Agus Budi Setyawan	Studi Pelestarian Kawasan Masjid	2005	Kawasan Masjid Menara Kudus			

Lanjutan Tabel 2.6 Tinjauan Studi Terdahulu Tentang Pelestarian

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Lokasi	Rumusan Masalah	Metode	Perbedaan dengan Studi Saat ini
		Menara Kudus Kabupaten Kudus Jawa Tengah		(Jawa Tengah)			

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



### 2.4.2 Studi terdahulu dengan wilayah studi Pulau Bali

Beberapa studi terdahulu yang memiliki sudut keilmuan yang sama (Arsitektur/Perencanaan Wilayah) dengan Pulau Bali sebagai wilayah studinya dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Siti Patimah (2006)

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Patimah mengambil tema yang sama, yaitu pelestarian dan dilakukan di wilayah studi berlatar belakang yang sama, yaitu Pulau Bali. Sesuai judul yang tertera pada penelitian dengan judul “Pelestarian Tata Ruang Permukiman Tradisional Desa Adat Ubud, Kabupaten Gianyar” ini mengambil lokasi studi di Kabupaten Gianyar. Penelitian ini berusaha membahas karakteristik sosial budaya dan tata pola ruang di Desa Adat Ubud untuk selanjutnya memberikan arahan pelestarian untuk tata pola ruangnya yang khas. Jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan dengan metode analisis menggunakan perpaduan antara metode deskriptif dengan metode analitis. Hasil arahan untuk pelestarian dari penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Arahan pelestarian fisik

###### - Tata ruang makro

- Upaya konservasi terhadap ruang maupun elemen-elemen ritual yang ada di Desa Adat Ubud seperti: ruang ritual lembah Sungai Campuhan, kawasan tebing, makam dan Pempatan Agung.
- Upaya preservasi dan konservasi terhadap bangunan-bangunan ritual, yaitu preservasi dilakukan pada Pura yang difungsikan khusus sebagai tempat ritual, yaitu Pura Desa, Pura Prajapati, Pura Gunung Lebah, Pura Kemuda Saraswati, Pura Sakenan, Pura Jati, Pura Batur Sari, Pura penataran, Pura Melanting dan Pura Dugul. Konservasi dilakukan pada Pura yang telah berfungsi ganda, yaitu sebagai tempat ritual dan komersil yang dilakukan pada Pura Puseh, Pura Dalem dan Pura Batu Karu.
- Upaya konservasi pada ruas jalan ritual sebagai tempat dilangsungkannya prosesi ritual, yaitu Jalan Raya Ubud dan Jalan Suweta.

###### - Tata ruang mikro

Arahan pelestarian fisik dibedakan menjadi tiga, yaitu preservasi, konservasi dan rehabilitasi/restorasi/adaptasi. Arahan untuk masing-masing golongan tempat tinggal adalah:

- Arahan pada tempat tinggal Geria: 1 preservasi, 2 konservasi dan 2 rehabilitasi/restorasi/ adaptasi;
- Arahan pada tempat tinggal Puri: 3 preservasi, 1 konservasi dan 6 rehabilitasi/restorasi/ adaptasi;
- Arahan pada tempat tinggal Jero: 2 preservasi, 7 konservasi dan 7 rehabilitasi/restorasi/ adaptasi; dan
- Arahan pada tempat tinggal Umah: 3 preservasi, 19 konservasi dan 32 rehabilitasi/restorasi/ adaptasi.

b. Arahan pelestarian non fisik

Secara ekonomi dengan insentif pajak, alokasi dana bantuan dari pemerintah, menjalin kerjasama antara pemerintah (dinas dan adat) dengan pihak swasta, pemberian subsidi, pengenaan denda materi dan teguran, serta meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat. Secara sosial adalah pemberian bonus, promosi, pengadaan forum, kemudahan perijinan, mempersiapkan SDM, pembinaan seni dan budaya serta pembinaan mental dan spiritual. Secara hukum adalah pengesahan dan penetapan Perda Cagar Budaya, pendaftaran bangunan cagar budaya, pemberlakuan ijin khusus, penetapan aspek kelestarian dalam Master Plan Tata Ruang Kota, penyusunan panduan atau pedoman perencanaan dan perancangan yang bersifat teknis, serta penyempurnaan Awig-awig Desa Adat.

Perbedaan penelitian saat ini yang berjudul “Pelestarian Istana Taman Air Soekasada Kabupaten Karangasem” dengan yang dilakukan oleh Patimah (2006) terdapat pada objek yang diambil, dengan kasus sebuah perkampungan adat, fokus pembahasannya terletak pada setiap bangunan kuno yang ada disana sebagai objek utamanya. Penelitian yang akan dilakukan saat ini mengambil suatu kasus yang berupa kawasan kompleks situs kuno dengan penekanan pelestarian pada tata ruang kawasan situs tersebut. Penelitian dari Patimah (2005) memberikan manfaat bagi penelitian saat ini terutama sebagai masukan dan pengayaan tema pelestarian untuk tinjauan teori.

## 2. I Komang Gede Santhyasa (2007)

Santhyasa (2007), melakukan penelitian dengan judul “Sistem Nilai Spasial Desa Adat Kesiman Pada Kawasan Perkotaan Denpasar”. Penelitian yang dilakukan oleh Santhyasa berbeda tema dengan penelitian saat ini namun memiliki beberapa konteks pembahasan yang sama, yaitu mengenai nilai tata keruangan di Bali yang

tidak bisa dipisahkan dari adat istiadat dan faktor keagamaan. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan menggunakan metode kualitatif-naturalistik di bawah paradigma fenomenologis. Analisis data dilakukan secara induktif dengan metode katagorisasi untuk mendapatkan sistem nilai, dan jalannya penelitian mengikuti alur naturalistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem nilai spasial yang terbentuk pada unit permukiman tradisional Desa Adat Kesiman, yaitu sebagai berikut:

- a. Sistem nilai keteraturan pola spasial, yang terbentuk oleh adanya orientasi spasial, pengaturan permukiman yang terencana, keteraturan tipologi rumah, dan adanya kecenderungan kesamaan bentuk bangunan rumah;
- b. Sistem nilai keberteraturan ruang kultural, yang terbentuk dengan keberadaan ruang-ruang kultural, proses membangun yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan, orientasi ruang *sacred profane*, dan terbangunnya upaya pelestarian nilai-nilai ruang kultural; dan
- c. Sistem nilai modernitas spasial, terbentuk disebabkan oleh keterbatasan lahan yang berakibat terjadinya perubahan nilai-nilai dalam proses membangun.

Perbedaan dengan penelitian pelestarian Istana Taman Air Soekasada saat ini terutama ada pada tema yang diambil oleh penelitian Santhyasa (2007), yaitu permukiman. Perbedaan yang lainnya ada pada objek penelitian ini yang memiliki fokus pada tata ruang, aktivitas, dan sistem nilai masyarakat Bali pada sebuah desa yang secara geografis terletak pada kawasan perkotaan sehingga pembahasan sangat terkait dengan teori tentang penerapan permukiman Hindu. Manfaat membaca penelitian Santhyasa (2007) bagi peneliti saat ini adalah untuk memperkaya kasanah tentang tata ruang Pulau Bali.

### 3. I G. N. Artha Udiyana (2008)

Penelitian Udiyana (2008) mengambil judul “Hubungan Sosial Budaya Ekonomi Dengan Pembentukan Ruang Permukiman Tradisional Baliaga Di Desa Adat Pengotan Kabupaten Bangli”, dengan tema permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakter sosial budaya dan ekonomi desa Adat Pengotan, mengetahui karakter ruang permukiman Desa Adat Pengotan, serta mengetahui hubungan sosial budaya ekonomi dengan pembentukan ruang Desa Adat Pengotan. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan metode analisis evaluatif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui karakter sosial budaya dan ekonomi desa dan untuk mengetahui karakter ruang permukiman objek studi. Metode analisis evaluatif digunakan untuk mengetahui pembentukan ruang di

Desa Adat Pengotan dan mengetahui hubungan sosial budaya ekonomi dengan pembentukan ruang permukiman tradisional Baliaga di wilayah studi penelitian. Oleh karena jenis data yang ada termasuk ke dalam skala nominal dan ordinal, maka di dalam metode analisis evaluatif juga digunakan teknik analisis *crosstab* dan *chi-square*. Hasil penelitian Udiyana (2008) menunjukkan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

- a. Terdapat perubahan pada pola alokasi ruang dan fungsi ruang pada bangunan rumah adat. Perubahan alokasi ruang terjadi pada tegalan rumah menjadi bangunan baru dan perubahan pada fungsi ruang terjadi pada bangunan *Bale Adat*. Pada ruang makro terjadi perubahan, yaitu permukiman adat dan banjar, terjadi perubahan pola alokasi ruang pada bangunan pasar.
- b. Berdasarkan hasil analisis *crosstab* dan *chi-square*, agama dan kepercayaan merupakan variabel yang memiliki hubungan kuat di dalam pembentukan ruang di Desa Adat Pengotan.
- c. Berdasarkan hasil analisis evaluasi, pembentukan ruang dan analisis *chi-square*, perubahan yang terjadi pada ruang mikro, yaitu rumah adat terjadi karena ada/tidak penghuni rumah adat. Perubahan ruang yang terjadi pada rumah adat akan berdampak pada perubahan proses upacara dalam kegiatan agama dan kepercayaan.

Perbedaan utama penelitian yang dilakukan Udiyana (2008) dengan penelitian saat ini adalah pada tema yang diambil, yaitu antara permukiman dan pelestarian, dan wilayah studi, yaitu di Bangli dan di Karangasem. Metode analisis yang digunakan pada penelitian saat ini, yaitu analisis deskriptif, kemudian analisis evaluatif, serta analisis pengembangan pelestarian. Pada tahapan metode analisis yang dilakukan oleh Udiyana(2008) hanya sampai pada tahap evaluatif, namun diperdalam dengan menggunakan teknik *crosstab* dan *chi-square*.

#### **4. Made Anik Wiryantini (2005)**

Latar belakang kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Wiryantini (2005) mengambil tema ekowisata dengan judul “Studi Karakteristik Taman Wisata Alam Danau Buyan Kabupaten Buleleng Berdasarkan Konsep Ekowisata“. Penelitian ini memiliki fokus pembahasan untuk mengetahui potensi dan permasalahan yang terdapat di Taman Wisata Alam Danau Buyan dan kemudian memberikan arahan pengembangan yang sesuai dengan konsep ekowisata. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik Taman Wisata Alam Danau Buyan



ditinjau dari sisi penawaran (supply), karakteristik sisi permintaan (demand) dan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan wisatanya. Sisi penawaran dianalisis untuk menemukan karakteristik Taman Wisata Alam Danau Buyan yang dapat ditawarkan untuk wisatawan, dengan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan wisatawan akan kegiatan wisatanya. Karakteristik Taman Wisata Alam Danau Buyan juga dianalisis untuk menemukan karakteristik kawasan yang harus dilindungi, baik dalam hal flora, fauna, bentang alam, maupun peninggalan sejarahnya kemudian dilakukan penilaian terhadap tingkat pemenuhan kriteria ekowisata di Taman Wisata Alam Danau Buyan.

Hasil penelitian yang dilakukan Wiryantini (2005) menunjukkan bahwa pada dasarnya Taman Wisata Alam Danau Buyan sesuai untuk dijadikan kawasan ekowisata, mengingat karakter fisik dan fungsi kawasannya yang juga merupakan kawasan konservasi yang berdampak luas terhadap wilayah sekitarnya. Taman Wisata Alam Danau Buyan mempunyai berbagai potensi baik dalam sumber daya alam, sumber daya kebudayaan maupun sarana dan prasarana. Beberapa potensi kawasan seperti keberadaan habitat fauna, lahan dengan bentang alam yang curam, serta benda cagar budaya perlu dilindungi, sehingga kegiatan konservasi dan kegiatan wisata dapat terintegrasi dengan baik. Berdasarkan permintaan wisatawan, maka bentuk pariwisata di TWA Danau Buyan adalah pariwisata alam yang didukung oleh wisata budaya. Perbandingan karakteristik Taman Wisata Alam Danau Buyan dengan kriteria ekowisata secara umum menunjukkan dalam beberapa hal kriteria ekowisata belum terpenuhi di Taman Wisata Alam Danau Buyan. Rendahnya tingkat kebersihan hingga kurangnya kontribusi kegiatan wisata bagi kehidupan ekonomi masyarakat juga menyebabkan perlunya strategi-strategi pengembangan untuk mengatasi hal tersebut, sehingga kegiatan wisata yang dilakukan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Perbedaan utama penelitian yang dilakukan Wiryantini (2005) dengan penelitian saat ini adalah pada tema yang diambil, yaitu antara pariwisata (ekowisata) dan pelestarian, dan wilayah studi, yaitu di Kabupaten Buleleng dan di Kabupaten Karangasem.

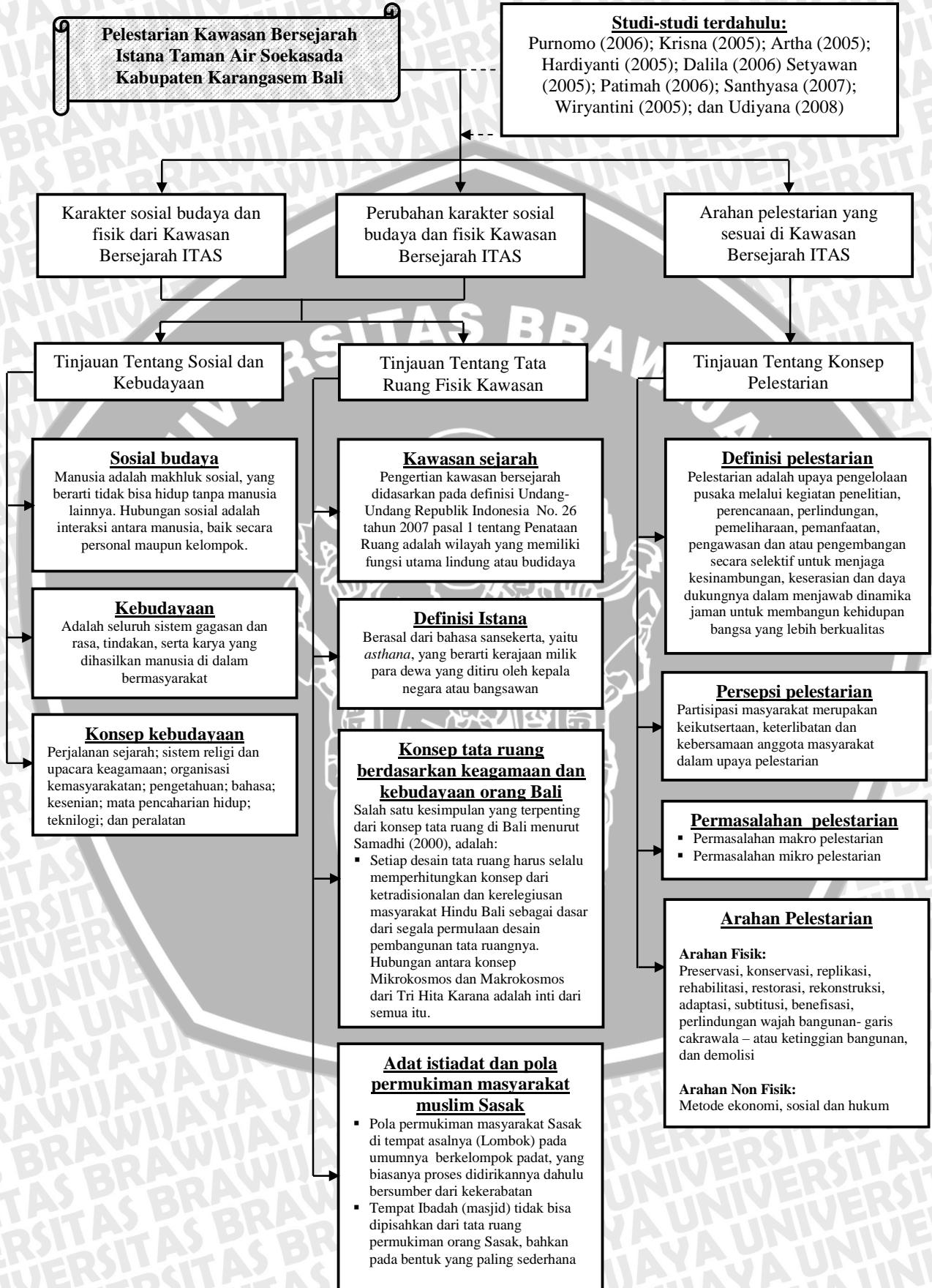
**Tabel 2.7 Tinjauan Studi Terdahulu Dengan Wilayah Studi Pulau Bali**

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Lokasi	Rumusan Masalah	Metode	Perbedaan dengan Studi Saat ini
1.	Siti Patimah	Pelestarian Tata Ruang Permukiman Tradisional Desa Adat Ubud, Kabupaten Gianyar	2006	Desa Adat Ubud (Kabupaten Gianyar)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah karakteristik sosial budaya masyarakat Desa Adat Ubud?</li> <li>2. Bagaimanakah karakteristik pola tata ruang permukiman tradisional Desa Adat Ubud?</li> <li>3. Bagaimanakah arahan pelestarian pola tata ruang permukiman tradisional Desa Adat Ubud?</li> </ol>	<p>Penelitian terapan (<i>apllied reserarch</i>) dengan metode analisis perpaduan antara metode deskriptif dengan metode analitis</p>	<p>Perbedaan penelitian saat ini yang berjudul “Pelestarian Istana Taman Air Soekasada Kabupaten Karangasem” dengan yang dilakukan oleh Patimah (2006) terdapat pada objek yang diambil, dengan kasus sebuah perkampungan adat, fokus pembahasannya terletak pada setiap bangunan kuno yang ada disana sebagai objek utamanya.</p>
2	I Komang Gede Santhyasa	Sistem Nilai Spasial Desa Adat Kesiman Pada Kawasan Perkotaan Denpasar	2007	Denpasar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimanakah karakteristik unit permukiman tradisional Desa Adat Kesiman?</li> <li>2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan pola spasial pada unit permukiman tradisional Desa Adat Kesiman?</li> <li>3. Sistem nilai spasial apakah yang terbentuk pada unit permukiman tradisional Desa Adat Kesiman?</li> </ol>	<p>Metode kualitatif-naturalistik dengan pendekatan paradigma fenomenologis</p>	<p>Perbedaan dengan studi pelestarian Istana Taman Air Soekasada terutama pada tema yang diambil oleh penelitian ini, yaitu permukiman. Perbedaan yang lainnya ada pada objek penelitian ini yang memiliki fokus pada tata ruang, aktivitas, dan sistem nilai masyarakat Bali pada sebuah desa yang secara geografis terletak pada kawasan perkotaan sehingga pembahasan sangat terkait dengan teori tentang penerapan permukiman Hindu.</p>
3	I G. N Artha Udiyana	Hubungan Sosial Budaya Ekonomi Dengan Pembentukan Ruang	2008	Desa Adat Pengotan (Bangli)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana karakteristik sosial budaya ekonomi di Desa Adat Pengotan, Kabupaten Bangli?</li> <li>2. Bagaimana karakteristik</li> </ol>	<p>Metode deskriptif dan metode evaluatif. Teknik <i>crosstab</i> dan <i>chi-square</i> digunakan dalam analisa evaluatif</p>	<p>Perbedaan pada tema yang diambil, yaitu permukiman dan pelestarian, dan wilayah studi, yaitu di Bangli dan di Karangasem. Pada tahapan</p>

Lanjutan Tabel 2.7 Tinjauan Studi Terdahulu Dengan Wilayah Studi Pulau Bali

No	Nama Peneliti	Judul	Tahun	Lokasi	Rumusan Masalah	Metode	Perbedaan dengan Studi Saat ini
		Permukiman Tradisional Baliaga Di Desa Adat Pengotan Kabupaten Bangli			ruang permukiman di Desa Adat Pengotan, Kabupaten Bangli? 3. Bagaimana hubungan sosial budaya ekonomi dengan pembentukan ruang permukiman di Desa Adat Pengotan, Kabupaten Bangli?		metode analisis yang dilakukan oleh di Desa Adat Pengotan hanya sampai pada tahap evaluatif, namun diperdalam dengan menggunakan teknik crosstab dan chi-square.
4	Made Anik Wiryantini	Studi Karakteristik Taman Wisata Alam Danau Buyan Kabupaten Buleleng Berdasarkan Konsep Ekowisata	2005	Taman Wisata Alam (TWA) Danau Buyan (Kabupaten Buleleng)	1. Bagaimana karakteristik TWA Danau Buyan ? 2. Bagaimana karakteristik wisatawan yang berkunjung ke TWA Danau Buyan dan keterlibatan masyarakat Desa Pancasari dalam kegiatan wisatanya ? 3. Bagaimana arahan pengembangan ekowisata di TWA Danau Buyan?	Metode deskriptif, dan evaluatif dengan pendekatan kuantitatif	Perbedaan utama penelitian yang dilakukan Wiryantini (2005) dengan penelitian saat ini adalah pada tema yang diambil, yaitu antara pariwisata (ekowisata) dan pelestarian, dan wilayah studi yaitu di Kabupaten Buleleng dan di Kabupaten Karangasem

2.5 Kerangka Teori (Gambar 2.6)



Gambar 2.6 Kerangka teori.